

Laporan Tahunan

2012-2013

1 Januari 2012 - 31 Desember 2013



January 1, 2012 - December 31, 2013

Annual Report



Laporan Tahunan

2012-2013

1 Januari 2012 - 31 Desember 2013



2012-2013
January 1, 2012 - December 31, 2013

Annual Report



LAPORAN TAHUNAN PUSHAM UII

1 Januari 2012 - 31 Desember 2013

Maret 2014

Penyusun
Eko Riyadi
Nova U. Utomo
Astri Unun Pratiwi
M. Syafi'ie
Nurdayad
Tri Guntur Narwaya
Arini Robbi Izzati

Penterjemah
Nova U. Utomo

Layout & Desain Sampul
Tarkima

Foto Dokumentasi
PUSHAM UII

Jeruklegi RT.13 RW.35 Gg. Bakung No. 517 A
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 452032 / Fax. (0274) 452158
Website: <http://www.pusham.uii.ac.id>
e-mail: pushamuii@yahoo.com

ANNUAL REPORT
PUSHAM UII
January 1, 2012 - December 31, 2013

March 2014

Prepared by

Eko Riyadi

Nova U. Utomo

Astri Unun Pratiwi

M. Syafi'ie

Nurdayad

Tri Guntur Narwaya

Arini Robbi Izzati

Translated by

Nova U. Utomo

Layout & Cover Design

Tarkima

Photos

PUSHAM UII

Jeruklegi RT.13 RW.35 Gg. Bakung No. 517 A
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 452032 / Fax. (0274) 452158
Website: <http://www.pusham.uii.ac.id>
e-mail: pushamuii@yahoo.com

This year PUSHAM UII held human rights training for several communities, among others, are (a) Human Rights Law lecturers throughout Indonesia, (b) the police officers who have served or are currently studying in Semarang Police Academy; (c) Islamic movement activists from various regions, especially in Yogyakarta and Central Java, (d) student movement activists; (e) members of task force of community oriented policing; (f) civil society community from various community cases of human rights violations.

As in previous years, for the last two years PUSHAM UII is generally performed four major activities. First is performing human rights capacity building to various stakeholders. Second is performing human rights research. Third is publishing a variety of scientific work and communications media. Fourth is advocating various strengthening human rights through education, research and advocacy.

Praise and gratitude toward Allah Almighty for all blessings that have been given to us all. Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia (PUSHAM UII) has ended its activities in the thirteenth year on 2013 since it was founded in 2000. This annual report contains report for two years activities, 2012 and 2013. For the last two years, PUSHAM UII continues to solidify its basic values as a study centre in strengthening human rights through education, research and advocacy.

Foreword

Sambutan

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas seluruh nikmat yang telah dikaruniakan untuk kita semua.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) telah mengakhiri kegiatan tahun ke-13 (ketigabelas) yaitu pada tahun 2013 sejak lembaga ini berdiri pada tahun 2000. Laporan tahunan ini akan berisi laporan selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2012-2013. Selama 2 (dua) tahun ini, PUSHAM UII masih terus memantapkan nilai dasarnya sebagai pusat studi untuk melakukan penguatan hak asasi manusia melalui jalur pendidikan, penelitian dan advokasi.

Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, 2 (dua) tahun belakangan ini PUSHAM UII secara umum melakukan 4 (empat) kegiatan besar. *Pertama*, melakukan *capacity building* hak asasi manusia kepada para *stakeholder*. *Kedua*, melakukan penelitian hak asasi manusia. *Ketiga*, melakukan penerbitan atas berbagai karya ilmiah dan media komunikasi. *Keempat*, melakukan advokasi atas berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Tahun ini PUSHAM UII mengadakan pelatihan hak asasi manusia dengan mengundang beberapa komunitas antara lain (a) dosen pengajar mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia se-Indonesia; (b) aparat kepolisian baik yang telah berdinis maupun yang sedang menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang; (c) aktifis gerakan Islam dari berbagai daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah; (d) aktifis gerakan mahasiswa; (e) anggota kelompok kerja (pokja) *community oriented policing*; (f) komunitas masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini berupa diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia untuk kepentingan pendidikan maupun penyemaian perdamaian.

Kegiatan kedua berupa penelitian dilakukan masih berkaitan dengan isu keamanan dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas aparat kepolisian serta tugas institusi penegak hak asasi manusia di Indonesia. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa secara institusional hak asasi manusia telah cukup mantap posisinya di Indonesia, namun pelanggaran hak asasi manusia juga masih cukup tinggi dan angkanya terus meningkat. Hal ini terjadi karena 2 (dua) hal antara lain *pertama*, belum adanya kesungguhan niat dari penyelenggara negara untuk menegakkan hak asasi manusia secara baik; dan *kedua*, sebagai temuan terbaru adalah lemahnya mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat yang terlanggar haknya. Berbagai lembaga yang memiliki kewenangan menerima pengaduan adanya pelanggaran hak asasi manusia masih berkecukupan soal perdebatan kewenangan serta kebingungan tentang cara penyelesaian kasus yang diadukan. Hal ini ditambah dengan tingginya angka pengaduan yang justru menyebabkan pengaduan-pengaduan tersebut tidak tertangani dengan baik.

Kegiatan ketiga berupa penerbitan. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat penting untuk mendiseminasikan hasil-hasil karya ilmiah maupun hasil kreasi media komunikasi yang lain. Media yang diterbitkan antara lain buku hasil penelitian ilmiah, komik, majalah, website, buletin, kaos, dan termasuk pembuatan film. Kegiatan ini dilakukan selain untuk sosialisasi hak asasi manusia secara masif juga untuk tujuan dokumentasi setiap kegiatan yang dikerjakan oleh PUSHAM UII.

Kegiatan keempat berupa kegiatan advokasi. Peran advokasi terus dikembangkan oleh PUSHAM UII. Advokasi ini dilakukan melalui dua cara yaitu advokasi non-litigasi dan bersifat personal dalam arti tanpa melibatkan lembaga lain, dan advokasi berjejaring. PUSHAM UII melibatkan dan/atau bergabung dengan beberapa lembaga

The second activity is research related to security issues and to police duties and other human rights enforcement agencies in Indonesia. From various researches conducted, in general it can be concluded that institutionally, human rights have been hold fairly steady position in Indonesia, yet human rights violations are still quite high and the numbers are continuing to rise. This occurs because of two factors, namely, the lack of good intention from state officials to enforce human rights, and refer to the latest findings, are the poor accessible complaints mechanisms for people whose rights are violated. Various agencies who have the authority to receive human rights violations complaints it selves are still debating their authority and confused on how to resolve the cases. This worsened by enormous number of complaints that causes the complaints are not handled properly.

The third is publishing activities. This activity became very important activities in disseminating the results of scientific work and other communication media. Media published are books of scientific research results, comics, magazines, websites, newsletters, t-shirts, and including filmmaking. These activities were performed in addition to massive human rights socialization as well for documentation of every activity undertaken by PUSHAM UII.

The fourth is advocacy activities. Advocacy was continued to develop by PUSHAM UII. This advocacy is done through two ways, namely non-litigation and personal organizations. These activities are form of dissemination of human rights values for the sake of peace education and seeding.

advocacy in the context of not involving other agencies, and advocacy networking. PUSHAM UII involve and/or join with several agencies that formally have the authority to perform advocacy such as Yogyakarta Legal Aid Institute, Institute for Consultation and Legal Aid Faculty of the Islamic University of Indonesia and Society Communication and Services (YANKOMAS) organized by the Yogyakarta Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights.

Finally, as the Director representing all managers and members of PUSHAM UII, I would like to express my gratitude toward the Islamic University of Indonesia for its support that enabled us to contribute positively to the society. Our highest gratitude and appreciation also for the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, The Asia Foundation (TAF), and AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) for the excellent cooperation that makes PUSHAM UII works possible to be realized. I would also like to thank the Judicial Commission of the Republic of Indonesia (KYRI), Office of the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia, the Yogyakarta Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights, the National Commission on Human Rights Republic of Indonesia, the Governor of the Police Academy (AKPOL) Semarang, Chief of Yogyakarta Regional Police, Chief of Yogyakarta City Police, Chief of Bantul Police, Chief of Sleman Police, Chief of Kulonprogo Police, Chief of Klaten Police, all networks that exist in various universities in Indonesia, National Commission for Women, National Commission for Child Protection, the Witness Protection Agency, Imparsial, KontraS, eLSAM, Women's Health Foundation (YKP), and other various partners PUSHAM UII which can not be named one by one, thank you very much for the warm cooperation that gives PUSHAM UII work a good meaning.

yang secara formal memiliki kewenangan untuk melakukan advokasi seperti Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta melalui lembaga Pelayanan dan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akhirnya, sebagai Direktur mewakili seluruh jajaran pimpinan dan anggota PUSHAM UII, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada pimpinan Universitas Islam Indonesia atas dukungannya sehingga lembaga ini tetap dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada *Norwegian Center for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, The Asia Foundation (TAF)*, dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) atas kerjasamanya yang sangat baik sehingga kerja-kerja PUSHAM UII menjadi terealisasi dengan baik. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI), Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Gubernur Akademi Kepolisian (AKPOL) Semarang, Kepala Polisi Daerah DIY, Kapolresta Yogyakarta, Kapolres Bantul, Kapolres Sleman, Kapolres Kulon Progo, Kapolres Klaten, jaringan PUSHAM yang ada di berbagai universitas se-Indonesia, KOMNAS Perempuan, KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi, Imparsial, KontraS, eLSAM, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan berbagai mitra kerja PUSHAM UII yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih atas kerjasamanya yang hangat sehingga kerja-kerja PUSHAM UII dapat memperoleh makna yang baik.

Secara khusus, selaku Direktur saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Pembina antara lain Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, dan Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., atas pengarahan dan bimbingannya. Terimakasih juga saya sampaikan terutama kepada seluruh staf (Nurdayad, S.Ag., St. Tri Guntur Narwaya, M.Si, Imran, S.H., M.H.), staf kantor (Unun, Nova, Arwin, Wid, Ima, Hari, Dwi, Manu, Anton), dan kepada seluruh relawan (Puguh, Syafi'ie, Kelik, Arini, dll), terimakasih atas kerja kerasnya. Terakhir, kami mengucapkan terimakasih kepada semua dewan pakar atas semua sumbangan pemikirannya. Semoga kami tetap bisa konsisten dalam bekerja dan lebih baik pada masa yang akan datang.

Eko Riyadi, S.H., M.H.
Direktur

Eko Riyadi, S.H., M.H.
Director

I also would like to express my highest appreciation especially to the Board of Trustees i.e. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, and Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., for their guidance. Many thanks mainly for Program staffs (Nurdayad, S.Ag, St. Tri Guntur Narwaya, M.Si, Imran, S.H., M.H.), office staffs (Unun, Nova, Arwin, Wid, Ima, Hari, Dwi, Manu, Anton), and all volunteers (Puguh, Syafi'ie, Kelik, Arini, etc.), thank you very much for your hard work. Finally, we wish to thank all of the board of experts of their contribution of thinking. I hope we keep consistent and become better in the future.

PUSHAM UII is an independent institution that emphasizes academic and scientific accountability and is impartial from any kind of interests. Independent means that PUSHAM UII has full right and authority to determine programs, administrators, as

conditions in Indonesia. Islamic University of Indonesia academic community to try to improve human rights inequality. Such fact then evokes a deep concern and strong motivation among the marked by various forms of human rights violations, sufferings, miseries and social For more than three decades under the New Order regime, Indonesia's history. Islamic University of Indonesia to the terrible human rights situation in Indonesia. The establishment of PUSHAM UII was a concern of academic community at the which was signed on April 7, 2000.

University of Indonesia with Hasballah M. Saad as Minister of State for Human Rights was a follow-up of the Memorandum of Understanding between the Rector of Islamic The Decree of Benefactor Board and the Rector of Islamic University of Indonesia Zaini Dahlan, M.A.

Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia, signed by Prof. of Indonesia Number 44/B.6/1V/2000 about the Appointment of Committee for Muhammad Djazman Alkindi ensued by the Decree of the Rector of Islamic University Board of Islamic University of Indonesia Number 9 of 2000 about the Establishment of Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia, signed by officially founded on 20 April 2000 with the issuance of the Decree of Benefactor Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia (PUSHAM-UII) was

History

About Us

Tentang Kami

Sejarah

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) secara resmi berdiri pada 20 April 2000 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Muhammad Djazman Alkindi disertai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 44/B.6/1V/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Prof. Zaini Dahlan, M.A.

Surat Keputusan Badan Wakaf dan Rektor Universitas Islam Indonesia itu merupakan tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Rektor Universitas Islam Indonesia dengan Hasballah M. Saad selaku Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada 7 April 2000.

Latarbelakang pembentukan PUSHAM UII adalah keprihatinan civitas akademika Universitas Islam Indonesia akan kondisi hak asasi manusia yang sangat buruk di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade di bawah rezim orde baru, sejarah Indonesia diwarnai dengan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, penderitaan dan kesengsaraan rakyat serta ketimpangan sosial. Kenyataan inilah yang melahirkan keprihatinan yang mendalam dan motivasi yang kuat di kalangan civitas akademika Universitas Islam Indonesia untuk berusaha memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia.

PUSHAM-UII merupakan lembaga studi independen yang mengedepankan pertanggungjawaban ilmiah akademik dan netral dari kepentingan apapun. Sifat

independen PUSHAM UII adalah penuh dalam arti PUSHAM UII memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan program, pengurus, serta kerjasama dengan lembaga lain. Hubungan antara PUSHAM UII dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif dan bukan hubungan komando.

Visi dan Misi

Menjadi pusat kajian hak asasi manusia yang utama, melakukan pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab.

Visi di atas akan direalisasikan dalam dua misi, yaitu :

1. Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pelatihan praktis hak asasi manusia bagi masyarakat publik.
2. Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.

The vision will then be realized into two missions, namely:

1. Promotion Mission which oriented to dissemination of human rights principles and practical training on human rights for the public.
2. Strengthening Mission that aimed to enable and strengthen the state and the society in implementing and protecting human rights and fundamental freedoms.

Become leading human rights studies centre, in performing education and advocacy to encourage humane, democratic and civilized government and people of Indonesia.

Vision and Mission

well as cooperation with other institutions. The relationship between PUSHAM UII and the University is a coordinative rather than directive.

Daftar Isi

Laporan Tahunan 2012

Memperkuat Nilai-Nilai Kewarganegaraan Melalui Institusi Keagamaan dan Kepolisian di Indonesia **1**

Pelatihan Hakim
 “Pengarusutamaan Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia” **10**

Seminar dan Workshop “Pengarusutamaan Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan di Indonesia” **13**

Advanced Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM **16**

Intermediate Training Hak Asasi Manusia bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM diberbagai Universitas di Indonesia **20**

Perpustakaan Online Dengan Alamat ‘e-pushamuii.org’ **23**

Rangkaian Program Hak Wanita dan Toleransi Beragama di Indonesia **25**

Focus Group Discussion “Mekanisme Advokasi Lembaga-Lembaga HAM Bagi Difabel” **29**

Riset Peta Advokasi dan Monitoring Peradilan Bersih Gerakan Civil Society di Yogyakarta **33**

Bagian Umum **38**

Realisasi Program Tahun 2012 **39**

Struktur Organisasi **40**

Laporan Keuangan **41**

Annual Report 2012

Strengthening Civic Values through Religious and Police Institutions in Indonesia **1**

Supporting Judicial Institution in Respecting, Fulfilling and Protecting Human Rights **10**

Seminar and Workshop “Mainstreaming Corruption as a Violation of Human Rights” **13**

Advanced Training for Human Rights Lecturers **16**

Intermediate Human Rights Training for Human Rights Law Lecturers **20**

“e-pushamuii.org” Online Library **23**

Women’s Rights and Religious Tolerance in Indonesia **25**

Focus Group Discussion: Advocacy Mechanism of Human Rights Organizations for Disabilities **29**

Mapping Research on Advocacy and Monitoring toward Clean Judiciary of Civil Society Movement in Yogyakarta **33**

Inventories **38**

Programs Of Year 2012 **39**

Organization Chart **40**

Financial Statement **41**

Content

Daftar Isi

Laporan Tahunan 2013

Memperkuat Nilai-Nilai Kewarganegaraan Melalui Institusi Keagamaan dan Kepolisian di Indonesia **45**
Pengarusutamaan Pendekatan HAM dalam Pemberantasan Korupsi **51**

Riset Analisis Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan dan Perkebunan terhadap Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia **53**
Capacity Building Dosen Pengajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dalam rangka Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hak Sipil dan Politik **57**

Program Hak Wanita dan Toleransi Beragama di Indonesia **59**
Riset Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja tentang Kesehatan Reproduksi **62**

Bagian Umum **64**
Realisasi Program Tahun 2013 **65**

Struktur Organisasi **66**
Laporan Keuangan **67**

Annual Report 2013

Content

Strengthening Civic Values through Religious and Police Institutions in Indonesia **45**
Promote Judiciary Institution in Eradicating Corruption for the Fulfillment of Human Rights **51**
 Legal Audit of Indonesian Business Law and Policy in Compliance with Human Rights Principles **53**
Lecturers Capacity Building in Promoting, Fulfilling and Protecting Human Rights: Civil and Political Rights **57**
 Women's Rights and Religious Tolerance in Indonesia **59**
Research on Knowledge, Attitudes and Behaviors of Adolescents on Reproductive Health **62**
 Inventories **64**
Programs Of Year 2013 **65**
 Organization Chart **66**
Financial Statement **67**

Laporan Tahunan

2012

1 Januari - 31 Desember 2012



January 1 - December 31, 2012

2012

Annual Report

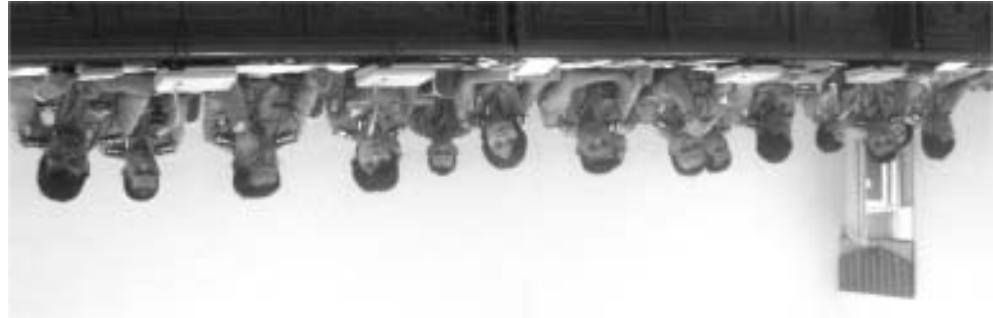


This activity was held on February-March 2012 initiated with two months *live in* at the Academy to explore as deep as possible information about teaching materials, both in terms of advantages and disadvantages, especially from the perspective of human rights and community policing. Results obtained are (1) subjects taught at the Academy are inadequate in term of recent conditions. (2) lack of curriculum renewal since it predetermined by headquarters. (3) Human rights and community policing subjects still require enrichment of content and applications.

RESEARCH ON TEACHING CURRICULUM

1. POLICE ACADEMY

The program more intensively focused on education at Police Academy besides other activities at Local Police of Yogyakarta Region and publishing campaign media to support acceleration of police reform and public education. Detailed activities are:



Strengthening Civic Values through Religious and Police Institutions in Indonesia

Programs

Program

Memperkuat Nilai-Nilai Kewarganegaraan Melalui Institusi Keagamaan dan Kepolisian di Indonesia



Program COP tahun 2012 lebih intensif menggarap Pendidikan Akpol disamping juga ada beberapa kegiatan di wilayah Polda daerah Istimewa Yogyakarta dan penerbitan media kampanye untuk mendukung percepatan reformasi Polri dan pendidikan masyarakat. Berikut secara rinci kegiatan yang telah terlaksana:

1. AKADEMI KEPOLISIAN

RISET KURIKULUM PENGAJARAN

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2012 dengan bentuk kegiatan berupa *live in* selama dua bulan di Akademi Kepolisian. Penelitian ini bertujuan menggali informasi sedalam mungkin tentang materi pengajaran, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangan terutama dari perspektif HAM dan Polmas. Hasil yang didapat adalah (1) Materi yang diajarkan di Akademi Kepolisian kurang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. (2) Tidak adanya pembaharuan disebabkan karena kurikulum sudah ditentukan oleh pusat. (3) Materi pengajaran HAM dan Polmas masih membutuhkan pengayaan isi dan aplikasi.

TRAINING METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan pelatihan ini adalah:

- a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi para tenaga didik Akademi Kepolisian dalam melakukan bimbingan skripsi bagi para taruna/i.
- b. memberikan bekal keahlian riset bagi para tenaga pendidik Akpol agar bisa bekerja mandiri tanpa tergantung pada tenaga ahli dari luar yang ahistoris terhadap kebutuhan kurikulum Akpol secara global.



Metode yang digunakan adalah pendidikan andragogi yang menempatkan peserta sebagai peserta aktif. Training ini diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Santika Premiere Yogyakarta dengan peserta 25

tenaga pendidik Akpol yang selama ini melakukan bimbingan skripsi ditambah dengan beberapa pejabat utama. Adapun materi yang diberikan meliputi lima fokus tema yang dibawakan oleh para praktisi dan akademisi yang kompeten:

- a. *Membuat Desain Penelitian* oleh Dr. Eric Hiariej, S.IP, M.Phil.
- b. *Mengembangkan Ilmu Sosial Kritis dalam Skripsi* oleh Dr. Eric Hiariej, S.IP, M.Phil.
- c. *Isu-isu Aktual Kepolisian sebagai Inspirasi Tema Skripsi* oleh Winarso dan Kombes Pol. Drs. Djarot Soebroto
- d. *Mengatasi Problem Teknis dan Non Teknis Bimbingan Skripsi* oleh Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A
- e. *Praktek Pembuatan Skripsi* oleh Amalinda Savirani, S.IP, M.P., Ph.D

- a. *Research Design Making* by Dr. Eric Hiariej, S.IP, M.Phil.
- b. *Developing Critical Social Sciences in Thesis* by Dr. Eric Hiariej, S.IP, M.Phil.
- c. *Actual Policing issues to inspire Thesis Theme* by Winarso and Kombes Pol. Drs. Djarot Soebroto
- d. *Overcoming Technical and Non-Technical Problems in Supervising Thesis* by Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A
- e. *Thesis Making Practice* by Amalinda Savirani, S.IP, M.P., Ph.D

practitioners and academics: materials provided include five focal themes presented by competent 25 educators who supervise cadets' thesis and other main officials. The



Yogyakarta inviting Premiere Hotel three days at Santika training was held involve actively. The participants to encourage andragogy which Method used is

the needs of the academy curriculum. independently without depending on outside experts who unfamiliar with b. Providing expertise on research for educators to enable them to work thesis guidance for the cadets.

a. Improving capacity and competency of Academy educators in providing

The aims are:

RESEARCH METHOOLOGY TRAINING

The training was held on 16-18 July 2012 at Santika Premiere Hotel Yogyakarta inviting 21 police officers. The aim of this training is to eliminate the culture of violence in the care giving process in the Police Academy as well as introducing human rights and gender as a basic principle in the Living Regulation of Cadets. Subjects and experts presented are:

a. PERDUPTAR Implementation Problems and Solutions by Kombes Pol. Edward Syah Pernong (Chief of Justice, Police Academy)

b. *Ideal Character Education Model For Cadets Care giving* by Suwardjo, Ph.D (Faculty of Education, State University of Yogyakarta)

TRAINING FOR POLICE ACADEMY CUSTODIAN



SCIENTIFIC WRITING COMPETITION ON "POLICE REFORM" AND NATIONAL BHAYANGKARADAY

This is joint activities between Police Academy, Cadet Senate, Law Faculty Diponegoro University Student Senate and PUSHAM UII. The competition results then presented nationally on June 28, 2012 at Police Academy Semarang.

TRAINING ON RESEARCH

The aims are to provide capability for research team who will perform evaluation research on the performance of the Academy alumni. The training was held two days in Semarang attended by two research teams, i.e. from PUSHAM UII and Police Academy.

TRAINING PENELITIAN BAGI PARA TIM RISET KINERJA ALUMNI AKPOL

Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan bekal kapasitas kepada para tim riset yang nantinya akan melakukan riset evaluasi kinerja para alumni Akpol. Training ini diselenggarakan selama dua hari dengan peserta antara lain tim riset Akademi Kepolisian dan tim riset PUSHAM UII. Kegiatan ini dilaksanakan di Akademi Kepolisian Semarang.

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH TENTANG "REFORMASI KEPOLISIAN" DAN SEMINAR NASIONAL MEMPERINGATI HARI BHAYANGKARA



Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama antara Akademi Kepolisian, Lembaga Senat Taruna Akademi Kepolisian, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan PUSHAM UII. Hasil lomba ini kemudian diseminarkan secara nasional pada tanggal 28 Juni 2012 di Akademi Kepolisian Semarang.

TRAINING PENGASUHAN AKPOL

Training ini diadakan pada 16-18 Juli 2012 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Dengan peserta berjumlah 21 orang perwira polisi. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghilangkan budaya kekerasan dalam proses pengasuhan di Akademi Kepolisian sekaligus memperkenalkan HAM dan Gender sebagai prinsip dasar (*soft law*) dalam Peraturan Hidup Taruna (Perduptar).

Materi dan para ahli yang memberikan presentasi adalah:

- a. *Problem Penerapan PERDUPTAR dan Solusinya* oleh Kombes Pol. Edward Syah Pernong (Kepala Bidang Hukum dan HAM Akpol)
- b. *Model Pendidikan Karakter Yang Ideal Bagi Pengasuhan Taruna* oleh Suwardjo, Ph.D (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta)

- c. *Pengembangan Skill Kepengasuhan* oleh Zora Arfina Sukabdi, S.Psi. M.Si (Universitas Indonesia).
- d. *Memahami Filosofi The Power of Character dari Perspektif Aikido: Studi Kasus Pendidikan Polisi Jepang* oleh Sensei Hakim (master Aikido)

TRAINING POLMAS DAN HAM BAGI TARUNA

Training Taruna Gelombang I

Training gelombang pertama ini dilakukan pada 17-20 September 2012 dengan

peserta berjumlah 80 orang yang terbagi dalam 2 kelas. Materi yang diberikan adalah *HAM dan Analisis Sosial* oleh Drs. Bambang Budiono (Universitas Airlangga Surabaya); *Gender* oleh Catur Udi Handayani dan Hidayatun Rahayu (Rifka



Annisa); *Perpolisian Masyarakat* oleh Tri Guntur Narwaya (PUSHAM UII); dan *Manajemen Konflik* oleh Hairus Salim dan Jamet Ahsan Hamidi (The Asia Foundation).

Training Taruna Gelombang II

Training gelombang kedua dilakukan pada 24-27 September 2012 dengan peserta berjumlah 80 orang yang terbagi dalam 2 kelas. Materi yang diberikan adalah *HAM dan Analisis Sosial* oleh Nur Ismanto, S.H, M.Si (Universitas Islam Indonesia) dan Leopold Sudaryono, S.H., LL.M. (The Asia Foundation); *Gender* oleh Catur Udi Handayani dan Siti Roswati Handayani (Rifka Annisa); *Perpolisian Masyarakat* oleh Puguh Windrawan, S.H., M.H. dan M. Syafii'ie, S.H. (PUSHAM UII); dan *Manajemen Konflik* oleh Drs. Mochammad Sodik, S. Sos., M. Si (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

The second batch was held on 24-27 September 2012, attended by 80 cadets, divided into two classes. Subjects provided are *Human Rights and Social Analysis* by Nur Ismanto, S.H, M.Si (Islamic University of Indonesia) and Leopold Sudaryono, S.H., LL.M. (The Asia Foundation); *Gender* by Catur Udi Handayani and Siti Roswati Handayani (Rifka Annisa); *Community Policing* by Puguh Windrawan, S.H., M.H. and M. Syafii'ie, S.H. (PUSHAM UII); and *Conflict*

Batch II

Asia Foundation).

Salim and Jamet Ahsan Hamidi (The

Conflict Management by Hairus

Narwaya (PUSHAM UII); and

Community Policing by Tri Guntur

Hidayatun Rahayu (Rifka Annisa);

Gender by Catur Udi Handayani and

(Airlangga University Surabaya);

Analysis by Drs. Bambang Budiono

divided into two classes. Subjects provided are *Human Rights and Social*

The first batch was held on 17-20 September 2012, attended by 80 cadets,

Batch I

ACADEMY CADETS

TRAINING ON COMMUNITY POLICING AND HUMAN RIGHTS FOR POLICE

Perspective: Case Study Japan Police by Sensei Hakim (Aikido Master)

d. *Understanding the Philosophy of The Power of Character from Aikido*

University).

c. *Developing Care giving Skill* by Zora Arfina Sukabdi, S.Psi. M.Si (Indonesia

This research was jointly performed by Police academy Research Team and PUSHAM UII Research Team toward Alumni of Police Academy year 2006-2010 at six Local Police. Even so, the aim of the research between two teams is slightly different. The Academy team observing the extent of the performance of the graduates in applying learning, training, and care giving obtained when studied

RESEARCH ON POLICE ACADEMY GRADUATES

The fourth batch was held on 8-11 October 2012 attended by 58 cadets, consists of 49 male cadets and 9 female cadets. They are divided into two classes. Subjects provided are *Human Rights and Social Analysis* by Nur Ismanto, S.H., M.Si (Islamic University of Indonesia); *Gender* by Catur Udi Handayani and Siti Roswati Handayani (Rifka Annisa); *Community Policing* by M. Syafii, S.H. and Nurdaryad, S.Ag (PUSHAM UII) and *Religion Related Conflict Management* by Drs. Yusdani, M.Sc (Islamic University of Indonesia) and Jamet Ahsan Hamidi (The Asia Foundation).

Batch IV

The third batch was held on 1-4 October 2012 attended by 55 cadets, divided into two classes. Subjects provided are *Human Rights and Social Analysis* by Nur Ismanto, S.H., M.Si (Islamic University of Indonesia); *Gender* by Catur Udi Handayani and Siti Roswati Handayani (Rifka Annisa); *Community Policing* by Drs. Yusdani, M.Sc (Islamic University of Indonesia) and Hairus Salim (LKIS).

Batch III

Management by Drs. Mochammad Sodik, S. Sos., M. Si (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Training Taruna Gelombang III

Training gelombang ketiga dilakukan pada 1-4 Oktober 2012 dengan peserta berjumlah 55 orang terdiri dari 47 taruna dan 8 taruni yang terbagi dalam 2 kelas. Materi yang diberikan adalah **HAM dan Analisis Sosial** oleh Nur Ismanto, S.H., M.Si (Universitas Islam Indonesia); **Gender** oleh Catur Udi Handayani dan Siti Roswati Handayani (Rifka Annisa); Perpolisian Masyarakat oleh PUSHAM UII dan Manajemen Konflik Bernuansa Agama oleh Drs. Yusdani, M.Sc (Universitas Islam Indonesia) dan Hairus Salim (LKIS).

Training Taruna Gelombang IV

Training gelombang kedua dilakukan pada 8-11 Oktober 2012 dengan peserta berjumlah 58 orang terdiri dari 49 taruna dan 9 taruni. Peserta dibagi menjadi 2 kelas. Materi yang diberikan adalah **HAM dan Analisis Sosial** oleh Nur Ismanto, S.H., M.Si (Universitas Islam Indonesia) dan Samsudin Nurseha (LBH Yogyakarta); Gender oleh Catur Udi Handayani dan Siti Roswati Handayani (Rifka Annisa); Perpolisian Masyarakat oleh Muh. Syafii dan Nurdaryad (PUSHAM UII) dan Manajemen Konflik Bernuansa Agama oleh Drs. Yusdani, M.Sc (Universitas Islam Indonesia). dan Jamet Ahsan Hamidi (The Asia Foundation).

RISET ALUMNI AKPOL

Riset ini dilaksanakan secara bersama antara Tim Riset Akademi Kepolisian dan Tim Riset PUSHAM UII terhadap para alumni Akademi Kepolisian dari Angkatan 2006-2010 di 6 wilayah Polda. Meski begitu, tujuan penelitian sedikit berbeda antara Akademi Kepolisian dan PUSHAM UII. Tim Riset Akpol melihat sejauhmana kinerja para alumni tersebut dalam menerapkan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (JARLATSUH) yang pernah didapat sewaktu mengenyam pendidikan di Akpol, sementara tim PUSHAM UII selain melihat sisi JARLATSUH juga meneliti sejauhmana kinerja para alumni Akpol ini dalam melayani masyarakat terutama dengan parameter akuntabilitas, transparansi,

dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Waktu riset adalah 28 Oktober-3 November 2012 di 6 wilayah Polda yaitu Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

WORKSHOP EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PUSHAM UII-AKPOL 2012

Kegiatan ini diadakan pada 27-28 Desember 2012 bertempat di Hotel Santika Premiere Jogja. Tujuan workshop ini adalah refleksi dan evaluasi program kerjasama yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan proyeksi program 2013. Hasil dari workshop ini adalah menyepakati program bersama untuk lima tahun mendatang mengenai penanganan konflik bernuansa agama. Akhir dari workshop ini adalah kesepakatan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Akpol dengan PUSHAM UII. Narasumber workshop adalah KBP. Djarot Subroto (Akpol) dan D. Zawawi Imron (Budayawan) dengan ditambah grup seni musik *Golden Water* dan kesenian pantomim Jemek Supardi.

2. POLDA DIY

SURVEY TAHUNAN OPINI PUBLIK TERHADAP KINERJA KEPOLISIAN

Tema penelitian ini adalah “Sudahkah POLRI Berubah?: Studi Terhadap Akuntabilitas Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 2011”. Penelitian ini mulai pada Desember 2011 dan berakhir awal Februari 2012. Metode yang digunakan adalah investigatif-kualitatif. Kesimpulan riset adalah penyimpangan dalam penegakan hukum berpeluang terjadi dimana masyarakat cenderung bersikap diam. Rekomendasi riset adalah program penguatan masyarakat sipil (*civil society*) melalui *community policing* penting dalam membentuk masyarakat sipil yang kuat untuk memberikan kontrol publik atas kinerja kepolisian.

The theme of the research is “Has POLRI Changed? Study on Accountability of Law Enforcement under Yogyakarta Province Police Jurisdiction 2011”. Initiated on December 2011, it completed on the end of February 2012. Method used is investigative-qualitative. The research found that some misconduct on law enforcement might occur if people tend to stay ignorant. The recommendation is the necessity to strengthen civil society through community policing program which since it is crucial to have strong civil society to give public control toward police performance.

**ANNUAL SURVEY FOR PUBLIC OPINION ON POLICE PERFORMANCE
YOGYAKARTA REGIONAL POLICE**

It was held on 27-28 December 2012 at Santika Premiere Hotel Jogja. The aim of this workshop is to evaluate cooperation program along year 2012 and projecting 2013 program. The result is agreeing joint program for the next five years on religious conflicts. It was ended by signing *Memorandum of Understanding* between Police Academy and PUSHAM UII. Resource person invited are KBP. Djarot Subroto (Police Academy) and D. Zawawi Imron (humanist) and inviting musical arts group *Golden Water* and pantomime art by Jemek Supardi.

EVALUATION WORKSHOP FOR 2012 ACTIVITIES

at the Police Academy, while PUSHAM UII team observing the extent of graduates performance in serving the community especially with parameters of accountability, transparency, and protection of minorities. The research was performed 28 October-3 November 2012 at six Local Police Jurisdictions, i.e. North Sumatra, DKI Jakarta, East Java, South Sulawesi, South Kalimantan, and East Kalimantan.

participants are 26 persons.

Lawyer). Judicial Office was refusing to be present at the event. Attending Sleman), Dr. Oloan Sitorus (State Land College), Nur Ismanto, S.H., M.Si (Senior namely, IPTU Suranto (Sleman Police), Sukamto (former head of Land Office held two days at Santika Premiere Hotel Yogyakarta, inviting spoke persons, This activity is a continuation of previous discussion on land disputes. It was

LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN HANDLING LAND DISPUTE CASES”
TRAINING FOR STRATEGIC GROUPS: “ENCOURAGING PROFESSIONALISM OF

Yogyakarta.

agreed to form a land monitoring forum that will monitor land disputes cases in participants are 49 persons from various public elements. The discussion Wahyu KH, S.H. (Chairman of Indonesian Court Monitoring/ICM). Attending Province), AKBP Burkan Rudy Satria, S.IK (representative of Polda DIY), and Tri persons are Suhartono, S.H. (representative of Land Office Yogyakarta Province Police, and Indonesian Court Monitoring (ICM). Attending spoke concerns to land issues, such as Yogyakarta Province Office of Land, Yogyakarta On July 12th 2012, we tried to open a public discussion by inviting *stakeholders* police to judges.

multiple certificates that indicated the involvement of mafia, ranging from protection of land rights as a result of the emergence of several cases of government officials in providing assurance and certainty of law in the PUSHAM UII to monitor the performance of law enforcement officers and This event was organized on the basis of proposition of various parties for

OFFICIALS IN LAND DISPUTES CASES”
PUBLIC DISCUSSION ON “PROFESSIONALITY EVALUATION FOR LAW

DISKUSI PUBLIK “EVALUASI PROFESIONALITAS PARA PENEGAK HUKUM DALAM KASUS SENGKETA TANAH”

Kegiatan ini diselenggarakan atas dasar usulan berbagai pihak agar PUSHAM UII melakukan pemantauan kerja aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam perlindungan hak kepemilikan tanah akibat dari munculnya beberapa kasus sertifikat ganda yang terindikasi adanya keterlibatan mafia hukum, mulai dari polisi sampai hakim. PUSHAM UII mencoba membuka sebuah diskusi publik dengan mengundang para *stakeholder* pertanahan, yaitu Kepala BPN Provinsi DIY, Kapolda, dan Indonesian Court Monitoring (ICM). Diskusi ini diselenggarakan di PUSHAM UII pada 12 Juli 2012. Pembicara yang hadir adalah Suhartono, S.H. (wakil BPN Provinsi DIY), AKBP Burkan Rudy Satria, S.IK (wakil Polda DIY), dan Tri Wahyu KH, S.H. (Ketua *Indonesian Court Monitoring/ICM*). Acara ini dihadiri oleh 49 peserta dari berbagai elemen. Hasil diskusi tersebut menyepakati terbentuknya sebuah forum pemantauan pertanahan yang akan mengontrol kasus-kasus sengketa pertanahan di wilayah Yogyakarta.

TRAINING KELOMPOK STRATEGIS: “MENDORONG PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM DALAM KASUS SENGKETA PERTANAHAN”

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kegiatan diskusi sebelumnya. Acara ini diadakan selama dua hari di Hotel Santika Premiere Yogyakarta dengan mengundang narasumber IPTU Suranto (Polres Sleman), Sukamto (mantan Kepala BPN Sleman), Dr. Oloan Sitorus (Sekolah Tinggi Pertanahan Negara), Nur Ismanto, S.H., M.Si (Pengacara Senior). Pihak Kehakiman tidak bersedia hadir dalam acara ini dengan jumlah peserta 26 orang.

Hasil training tersebut para aparat pemerintah maupun penegak hukum mengetahui modus mafia pertanahan, mengetahui berbagai masalah awal

pemicu konflik pertanahan, mengetahui metode advokasi atau pendekatan atas masalah tersebut.

KULIAH UMUM DI KAMPUS

Kuliah Umum di Kampus (I)



Kegiatan ini diadakan pada 17 Desember 2012 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tema kuliah adalah "*Catatan Kritis Terhadap RUU Keamanan Nasional*". Pemateri yang hadir adalah King Faisal Sulaiman S.H., LL.M (Pengamat Hukum Tata Negara dan HAM) dan Eko Prasetyo (PUSHAM UII). Kuliah umum ini

dihadiri 155 peserta. Kesimpulan dari kuliah umum ini adalah bahwa RUU Keamanan Nasional hanya mengedepankan aspek pertahanan dan keamanan negara serta kewajiban bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam pembelaan negara saja sedangkan klausul pentingnya pemenuhan dan perlindungan HAM sangat dikesampingkan.

Kuliah Umum di Kampus (II)

Kegiatan ini diadakan pada 22 Desember 2012 di Kampus Universitas Gadjah Mada. Tema kuliah adalah "*Evaluasi Polisi: Polisi, Korupsi dan Terorisme*". Pemateri yang hadir adalah Nur Ismanto, S.H., M.Si, AKBP Djuhandani (Dir Reskrim Polda DIY), dan Herman Sinung Janotama (aktivis anti kekerasan). Kuliah umum ini dihadiri oleh 46 peserta. Kesimpulan dari kuliah umum ini adalah bahwa kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian akhir-akhir ini sangat erat hubungannya dengan belum berubahnya paradigma kepolisian dan sistem pendidikan yang masih militeristik sehingga menganggap warga sipil adalah objek penindasan.

The event was held on 22 December 2012 at Gadjah Mada University. The theme was "*Assessing: Police, Corruption and Terrorism*". Attending spoke persons are Nur Ismanto, S.H., M.Si, AKBP Djuhandani (Director of Criminal Unit

Public Lecture Phase II

discarded.

The lecture was attended by 155 participants. The conclusion of this lecture is that the National Security Bill merely emphasized state's defense and security aspects and citizen's obligation to take part in defending the country while the clause of the importance of human rights fulfillment and protection is much

The event was held on 17 December 2012 at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The theme was "*Critical Notes toward National Security Bill*". Attending spoke persons are King Faisal Sulaiman S.H., LL.M (Observer on Human Rights and Constitutional Law) and Eko Prasetyo, S.H. (PUSHAM UII).



Public Lecture Phase I

PUBLIC LECTURE ON CAMPUSES

The result of this training are: (1) government apparatus and law enforcer were able to identify the maneuver of land mafia. (2) identify preliminary issues that may ignite land conflicts. (3) understand the method of advocacy or approach in dealing with this problem.

Yogyakarta Province Police), and Herman Singung Janotama (anti violence activist). The lecture was attended by 46 participants. The conclusion of this lecture is that violence cases perpetuated by police nowadays are highly related to the unchanged police paradigm and their education systems which still adopt militarism therefore considered civilians as the object of oppression.

SEMINAR AND REGIONAL MEETING AT CAMPUSES

This event was held on 19 December 2012 upbringing theme "Critical Notes toward Security Bill Draft". Attended spoke persons are Irfan S. Awwas (Chairman of MMI), Setyoko (Legal Practitioner), and Zuhad Aji Firmantoro (Chairman of HMI Jogja) and



(Chairman of HMI Jogja) and attended by 74 participants. The conclusion is the Bill will only restore authoritarianism and induced public fear, therefore human rights aspects of this Bill should be emphasized.

REGIONAL MEETING FOR PARTNERS

This event was held on 18-19 December 2012 at Santika Premiere Hotel Yogyakarta and initiated with join sharing about activities that has been carried out along year 2012, followed by discussion on police-related issues as alternatives for 2013 program. Invited spoke person is Prof. Dr. Adrianus Meliala (Indonesia University). The meeting was attended by 36 participants. The result is the general theme for 2013 program is encouraging police institution service that is transparent, accountable, and prioritize the protection of minority and vulnerable groups.

SEMINAR DAN REGIONAL MEETING DI KAMPUS

Kegiatan seminar dan regional meeting di kampus ini diadakan pada 19 Desember 2012 dengan tema "Catatan Kritis Terhadap RUU Keamanan". Narasumber yang hadir adalah Irfan S. Awwas (Ketua MMI), Setyoko (Praktisi Hukum), dan Zuhad Aji Firmantoro (Ketua HMI Jogja). Peserta berjumlah 74 orang. Hasil yang didapat dari seminar ini adalah RUU Keamanan hanya akan mengembalikan pada situasi otoritarianisme dan berdampak memunculkan *public fear* sehingga aspek HAM dari RUU Keamanan perlu ditekankan.

REGIONAL MEETING MITRA COP

Kegiatan ini diadakan selama dua hari yaitu 18-19 Desember 2012 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Diawali dengan *sharing* bersama tentang refleksi perjalanan kegiatan yang sudah dilakukan oleh mitra selama tahun 2012, diteruskan dengan pengayaan isu yang terkait dengan kepolisian sebagai bahan pemilihan isu program 2013. Narasumber yang hadir adalah Prof. Dr. Adrianus Meliala (Universitas Indonesia). Selanjutnya, secara bersama merancang kegiatan, arah sasaran *stakeholder* dan dampak yang diharapkan dalam program 2013 dengan pendekatan matrik. Kegiatan ini dihadiri 36 peserta. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa tema besar kegiatan tahun 2013 adalah bagaimana mendorong pelayanan lembaga kepolisian yang transparan, akuntabel, dan memprioritaskan perlindungan kelompok minoritas dan kelompok rentan.



3. MAJALAH DAN MODUL

- ? Dua edisi majalah yang terbit pada periode Januari-Maret 2012 adalah **Majalah T-Ras** edisi 12 bulan November-Desember 2011 dengan tema **Anak Menjadi Korban Penegak Hukum** dan **Majalah Pledoi** Edisi 1 bulan Januari-Februari 2012 dengan tema **Peran Polisi dan Konflik Pertanahan**. Masing-masing dicetak sebanyak 500 eksemplar.
- ? Majalah Pledoi Edisi 2 Bulan Maret-April 2012, tema **Represifitas Polisi Terhadap Aksi Kenaikan BBM**, dicetak sebanyak 500 eksemplar
- ? Majalah Pledoi Edisi 3 Maret-Juni 2012, tema **Kekerasan Pelajar**, dicetak sebanyak 500 eksemplar.
- ? Penerbitan Modul Training Taruna Akpol **"Inilah Polisi-Polisi Masa Depan"**, dicetak sebanyak 500 eksemplar.

Pelatihan Hakim
 "Pengaruhutamaan Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia"

A. Pendahuluan



Korupsi masih menjadi musuh utama bagi bangsa Indonesia. Kualitas dan kuantitas korupsi semakin meningkat. Tindakan represif aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata belum berdampak pada penurunan angka korupsi. Sejauh ini, aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan tradisional dalam memberantas korupsi yaitu pendekatan hukum pidana. Pendekatan hukum pidana memang merupakan pendekatan wajib, namun pendekatan ini memiliki kelemahan.

Corruption remains a major enemy for Indonesia. The quality and quantity of corruption is increasing. Repressive actions of law enforcers, particularly the Anti-Corruption Commission has yet to have an impact on the growth of corruption. So far, law enforcers are still using the traditional approach in combating corruption, i.e. criminal law approach. Criminal law approach is a mandatory approach, but



A. Background

Supporting Judicial Institution in Respecting, Fulfilling and Protecting Human Rights

- ? *T-Ras Magazine* 12th Edition, theme: *Children as Victim by Law Enforcement Officials*
- ? *Pledoi Magazine* 1st Edition, theme: *Police Role and Conflicts Over Land.*
- ? *Pledoi Magazine* 2nd Edition, theme: *Police Repression toward Fuel Rate Increasing Protests*
- ? *Pledoi Magazine* 3rd Edition, theme: *Student Violence*
- ? *Training Module* for Police Academy Cadets: *"The Future Police"*

3. PUBLICATION

Subjects of the training are namely (1) Transparency and Accountability of Judicial Power by Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.; (2) The Role of Judicial Commission in Upholding the Principles of Transparency, Accountability as well as Checks and Balances in Judicial Power by Dr. Ibrahim, S.H., LL.M.; (3) Civil and Political Rights by Prof. Soetandyo Wignjosoebroto; (4) Economic,

district courts in Eastern and Central Indonesia. This year, the training was held twice. First one is in Lombok, 28-31 May 2012 and the second is in Yogyakarta, 11-14 June 2012. Each training was attended by forty corruption judges, both career and ad hoc, derived from the various

B. Description

trigger for human rights violations. The target of this activity is to encourage law enforcers, especially judges, to use human rights perspective in handling corruption cases. One alternative that can be done by judges when dealing with corruption is putting the people as victim to intensify the penalty.

Human rights approach is not used to replace the criminal law approach, but is used to mend the weakness of the criminal law approach. Human rights law encourages the eradication of corruption, is done by putting the wider community, including the unborn generations, as victim that has to be considered by law enforcers. Human rights approach put three approaches in combating corruption, namely (1) corruption as direct violation of human rights; (2) corruption as indirect violation of human rights; (3) corruption as rights approach.

Ull offers a new approach in the effort to combat corruption that is human corruption as a crime without victims (victimless crimes). Therefore, PUSHAM this approach has drawbacks. The main drawback of this approach is regarded

utama pendekatan ini adalah korupsi dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban (*victimless crimes*). Oleh karenanya, PUSHAM UII menawarkan pendekatan baru dalam upaya memberantas korupsi yaitu pendekatan hak asasi manusia.

Pendekatan hak asasi manusia tidak digunakan untuk menggantikan pendekatan hukum pidana, namun digunakan untuk menambal kelemahan pendekatan hukum pidana. Hukum hak asasi manusia mendorong agar pemberantasan korupsi dilakukan dengan meletakkan masyarakat luas, termasuk generasi yang belum lahir, sebagai korban yang harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum. Pendekatan hak asasi manusia meletakkan 3 pendekatan dalam memberantas korupsi, yaitu (1) korupsi sebagai bentuk pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia; (2) korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia tidak langsung; (3) korupsi sebagai pemantik terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Target dari kegiatan ini adalah mendorong aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk menggunakan perspektif hak asasi manusia dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh hakim ketika menangani korupsi adalah memosisikan rakyat korban sebagai pemberat hukuman.

B. Kegiatan

Pada tahun 2012, pelatihan ini diselenggarakan sebanyak 2 gelombang. Pelatihan pertama dilaksanakan di Lombok, 28-31 Mei 2012 dan yang kedua dilaksanakan di Yogyakarta, 11-14 Juni 2012. Masing-masing pelatihan diikuti oleh 40 orang hakim tindak pidana korupsi, baik hakim karir maupun hakim ad hoc, yang berasal dari berbagai pengadilan negeri di Indonesia wilayah timur dan Indonesia wilayah tengah.



Materi pelatihan antara lain
 (1) Transparansi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Narasumber: Dr. Artijo Alkostar, S.H., L.L.M.;
 (2) Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Prinsip

Transparansi, Akuntabilitas dan Checks and Balances dalam Kekuasaan Kehakiman, Narasumber: Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.; (3) Hak Sipil dan Politik, Narasumber: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto; (4) Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Narasumber: Joseph Adi Prasetyo; (5) Konstitusionalisme HAM di Indonesia, Narasumber: Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, (6) Penerapan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di Pengadilan, Narasumber : Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Irianto Subiakto, S.H., L.L.M.; (7) Studi Kasus Pengadilan HAM Eropa, Narasumber: Sebastien Coquoz; (8) Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Narasumber: Enny Soeprapto, P.hD; (9) Kewajiban Internasional Hak Asasi Manusia Indonesia, Narasumber: Dr. Makarim Wibisono.

Kegiatan ini terlaksana berkat kemitraan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung dan dukungan dari Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Universitas Oslo, Norwegia.

This activity is carried out on our cooperation with the Corruption Eradication Commission and the Supreme Court and the support of the Norwegian Center for Human Rights (NCHR), University of Oslo, Norway.

International Human Rights Obligations by Dr. Makarim Wibisono.



Social and Cultural Rights by Joseph Adi Prasetyo; (5) Constitutionalism of Human Rights in Indonesia by Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, (6) Implementation of Article 14 International Covenant on Civil and Political Rights in Court by Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. and Irianto Subiakto, S.H., L.L.M.; (7) Case Study: European Human Rights Court by Sebastien Coquoz; (8) Gross Violation of Human Rights by Enny Soeprapto, PhD; and (9) Indonesians

the occurrence of human rights violations. Indonesia as part of the international community has an obligation to ensure that corruption will be reduced so that human rights will be fulfilled properly. If Indonesia is unwilling or unable to eradicate corruption, then surely Indonesia has denying its international obligations. This international obligation occurs

Corruption is considered as one of the most serious crimes today. Corruption disrupt the stability and security of the community; destroyed democracy; ethical values and justice; ruined the construction of long-term development programs; and destroyed the economic system; and destroyed the rule of law that long built. Corruption is a violation of human rights, some people even think that the crime of corruption should be considered equivalent to the most serious crimes, such as genocide and crimes against humanity. Lately, many experts have devised a framework of corruption as a human rights violation in three forms, namely: (1) as direct violations where corruption is clearly a violation of human rights; (2) as indirect violations where corruption is a major factor in the chain of events contributing to human rights violations. In this case the infringement occurred due to other actions that are derived from corruption; (3) as remote violations where corruption became one of the factors triggering

Corruption is considered as one of the most serious crimes today. Corruption disrupt the stability and security of the community; destroyed democracy; ethical values and justice; ruined the construction of long-term development programs; and destroyed the economic system; and destroyed the rule of law that long built.



A. Background

Seminar and Workshop "Mainstreaming Corruption as a Violation of Human Rights"

Seminar dan Workshop "Pengarusutamaan Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan di Indonesia"

A. Latarbelakang



Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dianggap paling serius dewasa ini. Korupsi mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat; merusak tatanan demokrasi, nilai etis dan keadilan; merusak bangunan program pembangunan jangka panjang; memporakporandakan sistem ekonomi; dan menghancurkan tatanan Negara hukum (*the rule of law*) yang telah lama dibangun.

Korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia, bahkan sebagian orang menganggap bahwa kejahatan korupsi patut dianggap setara dengan *the most serious crimes* seperti *genocide* dan *crimes against humanity*. Dewasa ini, banyak ahli telah menyusun kerangka korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia melalui 3 (tiga) bentuk antara lain (1) sebagai *direct violations* atau korupsi yang secara langsung merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia; (2) sebagai *indirect violations* dimana korupsi menjadi faktor utama yang berkontribusi dalam mata rantai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Pada kasus ini pelanggaran hak terjadi karena tindakan lain yang merupakan turunan dari korupsi; (3) sebagai *remote violations* dimana korupsi menjadi salah satu faktor pemantik terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia sebagai bagian dari bangsa internasional memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korupsi akan dikurangi sehingga hak asasi manusia akan terpenuhi dengan baik. Jika Indonesia tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) memberantas korupsi, maka sesungguhnya Indonesia telah ingkar

terhadap kewajiban internasionalnya. Kewajiban internasional itu muncul karena Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh instrumen internasional tentang hak asasi manusia dan instrumen internasional tentang pemberantasan korupsi. Untuk yang terakhir, Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pada konsideran mengingatnya, Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa korupsi tidak lagi merupakan persoalan lokal nasional, tetapi telah menjadi musuh semua bangsa di dunia. Korupsi sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sebuah negara, sehingga perlu dilakukan upaya yang sistematis serta kerjasama internasional untuk melawan korupsi.

Indonesia hingga saat ini masih bergelut dengan muramnya situasi kenegaraan karena korupsi. Data *Transparency International* menunjukkan bahwa pada tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat 118 setara dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Pada konteks demokrasi, Indonesia berada pada urutan 53, sedikit lebih baik dibanding Thailand di nomor 58 dan Malaysia di nomor 64. Pada konteks indeks kualitas manusia, Indonesia menempati urutan 121, sedikit lebih baik daripada Vietnam yang berada pada urutan 127. Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi telah menyebabkan kualitas demokrasi rusak dan rendah serta mendegradasi kualitas manusia Indonesia.

B. Deskripsi Kegiatan

Menyikapi situasi di atas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia menginisiasi sebuah proyek dengan nama *Pengarusutamaan Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan di Indonesia*. Proses inisiasi dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu seminar, workshop, penulisan buku dan pelatihan hakim.

In 2012, two events have been completed, namely, seminar and workshop, while the ongoing activity is book writing. One other activity will be implemented in 2013.

In response to the above, the Centre for Human Rights Studies, Islamic University of Indonesia initiated a project Mainstreaming Corruption as a Violation of Human Rights through Courts Mechanism in Indonesia. Initiation process has been implemented through three stages, namely seminars, workshops, book writing and training for judges.

Since Indonesia has ratified almost all international instruments on human rights and eradication of corruption. For the latter, Indonesia has ratified the United Nations Convention against Corruption in 2003 by Law No. 7 of 2006. In the preamble, the Indonesian government is fully aware that corruption is no longer national local issue, but it has become the enemy of all the peoples of the world. Corruption affects the economic condition of the people in a country, so it required systematic effort and international cooperation to fight corruption. Transparency International data showed that in 2012, Indonesia was ranked 118 on par with the Dominican Republic, Ecuador, Egypt, and Madagascar. In the context of democracy, Indonesia ranks 53, slightly better than Thailand at 58 and Malaysia at 64. In the context of human quality index, Indonesia ranks 121, slightly better than Vietnam at 127. These data indicated that corruption has damaged and caused low quality of democracy as well degraded the quality of Indonesian people.

B. Activity Description

This section will only describe the seminars and workshops. Seminar held on Tuesday, May 15, 2012 in Yogyakarta, and was attended by 100 people from various elements of society. This seminar aims to publicize the idea of corruption as a human rights violation. Another goal is to get a response and public input regarding the idea. As a result, the public strongly supports and agrees with the idea.



The seminar opened with a keynote speech from the Chief of Justice, represented by the Chairman of the Supreme Court Criminal Section Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., presenting "Mainstreaming Corruption as a Violation of Human Rights through Court Mechanism in Indonesia", followed by a discussion with 3 speakers: Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum (representing the Corruption Eradication Commission) with the topic "The Role of the Commission in Mainstreaming Corruption as a Violation of Human Rights", Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., (representing the Judicial Commission) who spoke about the role of the Judicial Commission in Mainstreaming Corruption as a Violation of Human Rights, and Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H. (representing academia) who presented "Construction of Academic Corruption as a Violation of Human Rights".

Pada tahun 2012 ini, dua kegiatan telah selesai dilaksanakan yaitu seminar dan workshop, satu kegiatan sedang berjalan yaitu penulisan buku, dan satu kegiatan yang lain direncanakan dilaksanakan pada tahun 2013.

Laporan pada bagian ini hanya akan mendeskripsikan kegiatan seminar dan workshop. Seminar dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Mei 2012 bertempat di Yogyakarta dihadiri oleh 100 orang undangan dari berbagai kalangan. Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempublikasikan ide korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan yang lain adalah untuk mendapatkan respon dan masukan dari publik mengenai ide tersebut. Hasilnya, publik sangat mendukung dan setuju dengan ide tersebut.

Secara teknis, seminar dibuka dengan *keynote speech* dari Ketua Mahkamah Agung yang diwakili oleh Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., dengan



materi "Pengarusutamaan Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui Mekanisme Pengadilan di Indonesia". Seminar kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama 3 narasumber yaitu Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum (mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan materi "Peran KPK dalam Pengarusutamaan Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., (mewakili Komisi Yudisial) dengan materi Peran Komisi Yudisial dalam Pengarusutamaan Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H. (mewakili akademisi) dengan materi "Konstruksi Akademik Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia". Setelah seminar berakhir, dilanjutkan dengan sesi wokshop. Workshop dilaksanakan pada tanggal 15 Mei hingga 16 Mei 2012 dan diikuti oleh 20 orang

peserta. Workshop dimulai dengan mendengarkan presentasi dari Sebastian Coquoz (mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Oslo, Norwegia) dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang difasilitasi oleh Kanti Muji Kartika Rahayu. Workshop dilakukan untuk merumuskan hasil seminar dan kemudian mengkonstruksikannya menjadi sebuah kerangka buku teks mengenai korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menentukan penulis buku. Kerangka buku itulah yang akan digunakan sebagai patokan bagi tim penulis buku. Workshop juga menyepakati anggota tim penulis buku antara lain Kjetil F. Alvsaker, Busyro Muqoddas, Eko Riyadi, Mahrus Ali, Anang Zubaidi dan Syarif Nurhidayat.

Kegiatan selanjutnya adalah penulisan buku. Pada tahun ini, tim penulis telah melaksanakan proses penulisan buku hingga 60% dari target yang direncanakan. Harapannya, buku tersebut dapat terselesaikan pada tahun 2013.

Advanced Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM

A. Latarbelakang

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dan *Norwegian Center for Human Rights* Universitas Oslo Norwegia telah lama bekerjasama mendiseminasi hak asasi manusia di Indonesia dengan melakukan banyak pelatihan kepada para dosen di berbagai universitas di Indonesia terutama yang mempunyai fakultas hukum dan mata kuliah hak asasi manusia, dan kemudian



Center for Human Rights Islamic Studies University of Indonesia and Norwegian Center for Human Rights University of Oslo Norway has long cooperated in various universities. Lecturers from for human rights law numerous training c o n d u c t i n g rights in Indonesia by disseminating human

A. Background

Economic, Social and Cultural Rights Advanced Training for Human Rights Lecturers

The next activity is book writing. This year, the author team has completed the process of writing up to 60%. The book is expected to be completed in 2013.

After the seminar ended, a workshop was held on May 15 to May 16, 2012 and attended by 20 participants. The workshop begins a presentation from Sebastian Coquoz (Graduate student of University of Oslo, Norway), followed by a discussion facilitated by Kanti Muji Kartika. This workshop was conducted to formulate the results of the seminar and make it as a basic framework of the preparation of textbook on corruption as a violation of human rights as well as determine the author of the book. The framework is a guide for writing team. The workshop also agreed on the authors, among others, Kjetil F. Alvsaker, Busyro Muqoddas, Eko Riyadi, Mahrus Ali, Anang Zubaidi and Syarif Nurhidayat.

Therefore it is important to use facilitation method for this training to encourage empathy, have a clear comprehension to be presented in lectures, and jointly finding a way out of the problems mentioned above, both in terms of legality and in terms of application.

from the expectations of the people who want this country fair and prosperous:

violations, yet it still far to minimize human rights commissions which aimed and govern human rights defenders though there are many street and so on. Even homeless people on the corruptions, beggar and increasing number of



slum residents with unclear relocation, unaffordable education for the poor, increasingly oppress minorities and the poor. For instance, inhuman evictions of failed to fairly solve. On the other side, authorities and large companies rights in Indonesia were left unfinished. Even poverty-originated cases were

This training also inspired by many violations of economic, social and cultural participants to actively think and speak their mind. active involvement of all participants, since this method encourages the apply. Facilitation is necessary to applied in order to explore the potencies and methods used in previous trainings. This time facilitation model is attempted to The training using a new model, other than using seminar and workshop

meluas ke fakultas sosial politik, pendidikan dan hukum Islam (Syariah). Pelatihan Hak Asasi Manusia Lanjutan kali ini merupakan pelatihan yang menggunakan model baru, dibandingkan pelatihan sebelumnya yang menggunakan metode seminar dan workshop. Kali ini model fasilitasi dicoba diterapkan. Fasilitasi memang sangat perlu diterapkan untuk menggali potensi dan keaktifan peserta dalam pelatihan, karena metode ini bisa membuat situasi lebih hidup dan peserta aktif berbicara dan berpikir. Diharapkan peserta akan lebih banyak menyerap materi dan lebih mudah mengaplikasikan baik ketika di perkuliahan maupun ketika terjun di masyarakat.

Pelatihan ini juga diilhami oleh berbagai kasus pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia yang penyelesaiannya tidak kunjung



selesai. Bahkan semakin banyak penyelesaian kasus hukum yang bersumber dari kemiskinan masyarakat yang diselesaikan secara tidak adil. Di lain pihak para penguasa dan pengusaha besar semakin menindas kaum minoritas

dan masyarakat miskin. Misalnya masih banyaknya penggusuran rumah-rumah warga kumuh yang tidak manusiawi dan tidak jelas relokasinya, pendidikan yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, semakin banyaknya para koruptor, masih banyaknya pengemis dan gelandangan di jalan dan sebagainya. Walaupun ada berbagai lembaga-lembaga pejuang hak asasi manusia dan komisi-komisi pemerintah yang berjuang untuk meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia, namun masih jauh dari harapan masyarakat yang menginginkan

negara ini adil dan mensejahterakan masyarakat.

Maka sangat penting bahwa pelatihan para dosen kali ini menggunakan metode fasilitasi untuk mendorong empati, memiliki gambaran yang jelas untuk disampaikan di perkuliahan, dan bisa bersama-sama berpikir mencari jalan keluar dari masalah tersebut diatas, baik dari segi legalitas maupun dari segi aplikasi.

B. Deskripsi

Pelatihan ini diselenggarakan di Hotel Novotel Semarang 9-11 November 2012, diikuti oleh 40 orang dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Pelatihan dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh Direktur PUSHAM UII (Eko Riyadi) dan NCHR Universitas Oslo (Kjetil F. Alvsaker), dilanjutkan oleh Aksel T?mte (NCHR Universitas Oslo) yang menyampaikan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya di dunia internasional guna membuka cakrawala para peserta sebagai bekal referensi diskusi-diskusi selanjutnya.

Forum kemudian dipegang oleh fasilitator Roichatul Aswidah, M.Sc untuk mendiskusikan hak atas perumahan, pangan dan air bersih. Setelah menyampaikan pengantar, peserta diajak berdiskusi kelompok dengan metode menggambar perumahan dan lingkungan yang sehat dan kemudian dianalisis dengan peraturan yang ada dan dibandingkan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Melalui metode ini, para dosen bisa memberi usulan dan merumuskan cara advokasi di masyarakat, dan yang tak kalah penting metode ini juga bisa diterapkan pada mahasiswa. Metode yang sama juga dilakukan oleh fasilitator berikutnya yaitu Atikah Nuraini yang mengupas tentang hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan.

Pelatihan diselingi dengan sesi diskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dimana diharapkan KPK bisa mengungkap banyak data korupsi, sehingga korupsi patut dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekosob. Setelah itu forum

The training ended by discussion about the *Tendency of Human Rights Paradigm in Indonesia* by Eko Riyadi where participants were encourage to think about human rights enforcement in Indonesia that tends to politicized which make it hard to achieve fairness.

The training was combined with discussion with National Corruption Eradication Commission, where KPK is expected to reveal much corruption information, so corruption could be included as economic, social and cultural rights violation. Afterward, Hari Wibisono was asking participants to discuss monitoring mechanism and how to implement it.

Atikah Nuraini who discussed on the right to education and the right to work. student. The same method was also carried out by the next facilitator that is advocacy, and, none less important, this method also can be applied to the method, the lecturers can give suggestions and formulate way of public compared with the reality of what happened in the community. Through this environment and housing and then analyzed with existing regulations and invited to have group discussion using methods of drawing a healthy housing, food and clean water. After giving an introduction, participants are Roichatul Aswidah, M.Sc as facilitator, open the discussion on the right of rights in the international community as reference for further discussions.

Indonesia. Initiated by opening presentation by the Director PUSHAM UII (Eko Riyadi) and NCHR University of Oslo (Kjetil F. Alvsaker), proceeded by Aksel T?mte (NCHR University of Oslo) which address the economic, social and cultural rights in the international community as reference for further discussions.

B. Description

dilanjutkan oleh Harry Wibowo yang mengajak peserta membahas materi bagaimana mekanisme monitoring hak-hak ini dan mengimplementasikannya. Pelatihan ditutup dengan diskusi tentang *Kecenderungan Paradigma*



Hak Asasi Manusia di Indonesia yang disampaikan oleh Eko Riyadi dimana peserta diajak berfikir tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang cenderung banyak dipolitisir sehingga penegakan hukum hak asasi manusia ini sulit mencapai keadilan.

C. Hasil

1. Peserta paham tentang hak ekonomi, sosial dan budaya di tingkat internasional dan nasional.
2. Peserta paham dan bisa merumuskan bagaimana metode fasilitasi untuk disampaikan di kelas kuliah.
3. Peserta paham dan mampu merumuskan mekanisme *monitoring* dan implementasi hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan di dunia internasional.

3. Participants comprehend and able to devise monitoring mechanism and implementation of economic, social and cultural rights in Indonesia and international level.

their lectures.

2. Participants comprehend and able to devise method of facilitation to be used in

and international levels.

1. Participants comprehend economic, social and cultural rights at national

C. Results



Intermediate Training Hak Asasi Manusia bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM diberbagai Universitas di Indonesia

A. Latar Belakang



Hak asasi manusia menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara modern. Hak asasi manusia pada dasarnya mengakui dua hak mendasar yaitu hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada

perkembangannya diakui hak generasi ketiga yaitu hak-hak solidaritas. Secara umum, situasi hak sipil dan politik di Indonesia cenderung membaik, walaupun pada tahun-tahun terakhir ini mulai bermasalah kembali. Konflik antar dan intra pemeluk agama meningkat, kekerasan atas nama agama juga meningkat, sikap intoleran juga meningkat, konflik dalam dan karena pemilihan umum, ditambah dengan tindakan pembiaran dari negara. Situasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus diadvokasi agar tidak terjadi di masa yang akan datang.

Di samping persoalan hak sipil dan politik, Indonesia juga masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk memperbaiki situasi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, situasi para tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang memprihatinkan, akses kesehatan yang masih terbatas, akses pendidikan yang belum merata, situasi perumahan yang timpang, perebutan air karena penguasaan oleh pihak non-negara, angka busung lapar yang cukup tinggi, angka kemiskinan yang cenderung meningkat, merupakan sederet persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia.

Other homework that Indonesia has to deal with is improving situation of economic, social and cultural. Unemployment due to termination of employment, poor conditions of Indonesian workers abroad, limited access to health, uneven education access, unequal housing, fight over control of water dominated by non-state party, high malnutrition rate, increasing poverty, are a series of economic and social problems faced by Indonesia.

Such situation surely cannot be justified and require advocacy to avoid prolonged disputes in the future.

although within last years it starts declining. Conflicts between and among religious followers are increasing, violence in the name of religion also increasing as well as intolerant demeanor. It is worsen by State's ignorance. Such situation surely cannot be justified and require advocacy to avoid prolonged disputes in the future.



Afterwards, there was also cultural rights. economic, social and civil and political rights in Indonesia is improving, generation of rights, i.e. solidarity rights. Generally, protection of civil and political rights in

A. Background



This training is for human rights law lecturers from all over Indonesia. Method used is using two approaches, i.e. facilitation and lecturing. Several persons was prepared to facilitate,

B. Description

Therefore, Pusham UII with Norwegian Center for Human Rights (NCHR), University of Oslo Norway arranged intermediate human rights training which will take several important themes relating to economic, social and cultural rights, civil and political rights monitoring mechanism, both international and regional.

Normatively, Indonesia has ratified International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in 2005. Far before, Indonesia Government have ratified many international human rights instruments, such as *Convention against Torture* and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and Convention on the Rights of the Child. The problem is, the ratification seems not provide sufficient impact for the improvement of the human rights situation in Indonesia. Therefore, it requires continuous dissemination and evaluation so that, in future, fulfillment of economic, social and cultural rights is improving.

Secara normatif, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tahun 2005. Jauh sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak. Persoalannya adalah, ratifikasi tersebut nampaknya belum memberikan imbas yang memadai bagi perbaikan situasi hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi dan pengkajian terus menerus agar ke depan, situasi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya ini semakin baik.

Oleh karena itu, Pusham UII bekerjasama dengan Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Universitas Oslo, Norwegia menyelenggarakan training lanjutan hak asasi manusia yang akan mengambil beberapa tema penting berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak sipil dan politik, serta mekanisme monitoring hak asasi manusia, baik internasional maupun regional.

B. Deskripsi Kegiatan

Training ini diperuntukkan untuk para dosen hukum dan HAM di berbagai wilayah di Indonesia. Model pelatihan yang dipergunakan menggunakan dua pendekatan, yaitu fasilitasi dan *lecturing*. Ada beberapa pemateri yang memang dipersiapkan untuk memfasilitasi, dimana mereka tidak sekedar menyampaikan



materi, tetapi juga diberikan kebebasan untuk mengelola forum dengan *game* dan diskusi kelompok. Di samping itu, ada beberapa materi yang menyampaikan materinya dengan

model *lecturing*. Di forum itu terdapat moderator, pembicara dan setelah itu dibuka dengan tanya jawab.

C. Hasil Kegiatan

Intermediate training bagi dosen tahun ini digelar di Balikpapan pada 6-8 November 2012. Sekitar 40 dosen mewakili perguruan tinggi dari berbagai daerah hadir. Peserta pada pelatihan ini disaring dari 80 orang peserta *basic training* yang sebelumnya diselenggarakan di Yogyakarta dan Surabaya tahun 2011. 40 peserta ini dinyatakan bisa mengikuti intermediate training ini karena mereka telah membuat tulisan dengan standar jurnal. Setelah melalui *review* dari beberapa dosen senior, karya tulisan peserta *intermediate training* tersebut telah dibukukan.

Materi pelatihan yang disampaikan meliputi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, *Access to Justice*, Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, *Human Rights Monitoring Mechanism European, Inter American, dan African Union*, Mekanisme Monitoring Hak Asasi Manusia ASEAN dan OIC, dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Pemateri pelatihan ini diantaranya Kjetil M. Larsen (Associate Professor, University of Oslo Norway), Dr. Suparman Marzuki, SH. M.Si, Antarini Pratiwi Arna, S.H., LL.M, Enny Soeprapto, PhD, Risnawati Utami, S.H., LL.M (Ketua Konsorsium Nasional Difabel), dan Zainal Abidin, S.H. (Deputi Direktur Elsam).

which not only deliver presentation, but also freely manage the forum using means that most suitable, such as game and discussion. Besides that, some materials by some spoke persons were delivered using lecturing model assisted by moderator and have questions and answers session.

C. Results

The training was held in Balikpapan on 6-8 November 2012. Forty lecturers from various universities were attended. These participants screened from 80 participants who previously attend basic training held in Yogyakarta and Surabaya in 2011. They are eligible to participate in the intermediate training because they have made writing with journal standards. After reviewed by several senior lecturers, their writings published in a form of book.

Subjects conveyed in the training are *Convention against Torture* and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Access to Justice, Convention on the Rights of the Child, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Human Rights Monitoring Mechanism of European, Inter American, and African Union, Human Rights Monitoring Mechanism of ASEAN and OIC, and *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Spoke persons are namely, Kjetil M. Larsen (Associate Professor, University of Oslo Norway), Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Antarini Pratiwi Arna, S.H., LL.M, Enny Soeprapto, PhD, Risnawati Utami, S.H., LL.M and Zainal Abidin, S.H.

Dissemination of human rights is one thing that still needs to be done continuously. This statement is based on a situation where the spread of the values and principles of human rights in Indonesia in general is still inadequate and enforcement efforts are still constrained by a variety of reasons such as reasons of culture and knowledge. What is meant by cultural reasons is that there are still many Indonesian people, including state officials, who think that human rights is a western product and is not in accordance with the culture of Indonesia. The definition of the reason of knowledge is related to the poor understanding of the state officials and public on human rights. This situation led them to disrespect human rights. State officials are unaware of their obligation to fulfill the rights of the people. On the other hand, many people also unaware that in fact their rights have been violated.

The above situation occurs because of, among others, information regarding human rights has not been properly socialized. People still have difficulties in finding a variety of texts and books on human rights. Until now, it is still very difficult to find books human rights. Students, especially law students from all levels of education, have difficulties in finding a variety of literature and reading materials related to human rights. Complaints about the scarcity of human rights reference books expressed by the majority of people who want to study the human rights.

A. Background

“e-pushamuii.org” Online Library

Perpustakaan Online Dengan Alamat ‘e-pushamuii.org’

A. Latarbelakang

Diseminasi hak asasi manusia merupakan satu hal yang masih sangat perlu untuk dilakukan terus menerus. Pernyataan ini didasarkan pada situasi dimana secara umum penyebaran nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia masih belum memadai dan upaya penegakannya masih terkendala berbagai alasan seperti alasan kebudayaan dan alasan pengetahuan. Alasan kebudayaan yang dimaksud adalah masih banyaknya orang, termasuk aparat Negara, Indonesia yang berpikir bahwa hak asasi manusia adalah produk barat dan tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Sementara alasan pengetahuan adalah berkaitan dengan lemahnya pemahaman aparat Negara dan masyarakat tentang hak asasi manusia. Situasi ini menyebabkan aparat Negara dan masyarakat sekaligus tidak terlalu peduli dengan hak asasi manusia. Aparat Negara tidak peduli bahwa mereka punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Di sisi lain, masyarakat banyak yang belum mengerti bahwa sesungguhnya hak-hak mereka telah terlanggar.

Situasi di atas terjadi, salah satunya, karena informasi mengenai hak asasi manusia belum tersosialisasi dengan baik. Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menemukan berbagai naskah maupun buku yang berisi hak asasi manusia. Hingga saat ini, masih sangat sulit untuk menemukan buku-buku hak asasi manusia. Mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum dari segala tingkatan pendidikan, merasakan kesulitan untuk menemukan berbagai literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Keluhan tentang langkanya buku referensi hak asasi manusia dinyatakan oleh sebagian besar orang yang ingin mempelajari hak asasi manusia.

B. Kegiatan

Menjawab situasi di atas, maka pada tahun 2012, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia telah mendesain dan meluncurkan perpustakaan *online* dengan alamat situs '**e-pushamuii.org**'.

Peluncuran perpustakaan *online* ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan informasi tentang hak asasi manusia serta menyediakan bahan bacaan dan informasi tentang hak asasi manusia.

C. Hasil Kegiatan

Secara umum, isi perpustakaan *online* ini antara lain:

1. Buku-buku yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
2. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia yang terdiri dari:
 - a. Instrumen Internasional
 - b. Instrumen Regional
 - c. Instrumen Sub-Regional
3. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia yang terdiri dari:
 - a. Instrumen Hak Sipil dan Politik
 - b. Instrumen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
4. Makalah-makalah yang telah didapatkan pada setiap pelatihan yang dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
5. Resensi buku-buku hak asasi manusia, baik buku-buku dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Bagian ini menjadi sarana penting bagi pembaca untuk mengetahui informasi mengenai perkembangan buku-buku baru tentang hak asasi manusia.

B. Activity Description

In response to the above situation, in 2012, the Center for Human Rights Studies, Islamic University of Indonesia has designed and launched an online library with the website address 'e-pushamuii.org'. The launch of the online library was done in order to facilitate public access as well as providing reading materials and information about human rights.

C. Results

Generally, the content of the online library are:

1. The books published by Center for Human Rights Studies, Islamic University of Indonesia

2. International Instruments of Human Rights which consists of:

a. International Instruments

b. Regional Instruments

c. Sub-Regional Instruments

3. National Instruments of Human Rights which consists of:

a. Civil and Political Rights Instruments

b. Economic, Social and Cultural Rights Instruments

4. The papers obtained at every training conducted by the Center for Human Rights Studies, Islamic University of Indonesia

5. Reviews on human rights books, both in English and in Indonesian. This section is therefore an important tool for readers to find out information about new books on human rights.



Increasing conflicts, maltreatments, arrests in the name of religion, such as the case of Ahmadiyah, bombings in different areas such as Bali, Cirebon, Jakarta, and others, and even a case of false prophets and cult is

phenomena of freedom of thought that should wisely examined and addressed. It is indeed difficult to solve, even State as authority and policies holder sometimes fail to make proper policies to solve religious conflicts

A. Background

Women's Rights and Religious Tolerance in Indonesia

6. General information on:
- a. Titles of books that are available and how to access them.
 - b. The books that can be purchased and how to access them.
 - c. Collection of human rights films and how to access them.
 - d. Information on a variety of human rights meetings, trainings and conferences both nationally and internationally.
 - e. Information about national and international programs, either masters or doctorate in the field of human rights.

Rangkaian Program Hak Wanita dan Toleransi Beragama di Indonesia

A. Latarbelakang

Maraknya konflik, penganiayaan, pengrusakan, penangkapan yang mengatasnamakan agama seperti kasus Ahmadiyah, pengeboman-pengeboman di berbagai wilayah seperti Bali, Cirebon, Jakarta dan lain-lain serta bahkan adanya kasus nabi palsu maupun aliran yang dianggap sesat merupakan fenomena kebebasan berfikir yang perlu dikaji dan disikapi dengan bijaksana. Hal ini memang tidak mudah untuk diselesaikan, bahkan Negara



sekalipun sebagai pemegang otoritas dan kebijakan kadang tidak tepat dalam membuat kebijakan untuk menyelesaikan konflik berbasis agama ini sehingga membuat para penegak kebijakan tersebut gamang untuk bertindak, apalagi jika konflik yang berbasis agama ini dilakukan oleh partai besar atau organisasi keagamaan besar. Hal ini sangat sulit bagi pemerintah khususnya polisi untuk menanganinya.

Polisi sebagai aparat negara yang paling depan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik berbasis agama ini akan sangat kesulitan jika mereka belum mempunyai ilmu dan keahlian dalam penanganan kasus kebebasan beragama. Karena itu menjadi penting bagi aparat kepolisian untuk mendapatkan materi penanganan konflik berbasis agama ini mulai sejak di pendidikan (AKPOL) seperti materi hak asasi manusia, agama dan budaya, ketegasan dalam penegakan hukum, SOP yang jelas dan nir kekerasan. Adalah penting untuk mendapatkan pengetahuan tentang penanganan kasus berbasis agama yang berdimensi HAM bagi para pendidik dan calon perwira polisi di AKPOL sebagai langkah awal menuju pembentukan karakter polisi yang menghormati dan melindungi kebebasan beragama.

Menurut pengalaman Pusham UII sejak tahun 2005 di Akpol memang belum ada mata kuliah yang mempelajari penanganan konflik berbasis agama ini. Bahkan para polisi yang kami temui masih cenderung gamang jika dihadapkan dengan aksi massa yang mengangkat kasus SARA ini. Hal ini karena mulai dari kebijakan/komando yang tidak jelas, SOP yang meragukan dan lain-lain. Dengan kata lain para polisi tersebut belum mempunyai keahlian dalam penyelesaian kasus ini sehingga menjadi sangat penting untuk memberikan materi penanganan konflik berbasis agama ini agar calon perwira dan para pendidiknya mempunyai pemahaman dan keahlian dalam menangani kasus ini. Hal ini sangat penting sebagai bekal ketika mereka kelak memegang tampuk kebijakan di tubuh polri.

which then make enforcement officers hesitates to act, moreover if the conflicts conducted by major religious organization.

Police as foremost state agency in confronting and resolving religion-based conflicts will encounter many difficulties if they do not have the knowledge and expertise in handling religious freedom cases. Therefore, it is important for police to obtain such knowledge and expertise in their education at Police Academy such as human rights, religion and culture, firmness in enforcing the law, clear standard operation procedure and avoiding violence. It is important to obtain knowledge in handling religious conflicts with human rights dimension for police educators and candidates at Police Academy as initial step toward police's character building who respect and protect freedom of religious.

According to PUSHAM's experience since 2005 working with Police Academy, there are no subjects that specifically study the resolution for religious-based conflicts. Police are still tending to be hesitating and unsure if faced with mass action related to tribes, religious and race difference cases. This caused by unclear command nor policy, dubious procedure and many others. In other words, police do not have the expertise in handling the case which became important to provide religious conflicts resolution subject so that future police and their educators has proper comprehension and skill to handle this kind of cases and will also be useful in the future when they hold the power in making policies within police body.

To accelerate protection of religious freedom intervention process toward police leaders, then PUSHAM initiated assessment on the possibility to insert this subject to School for Police Staff and Leader School in Bandung through



Police Education Institution Jakarta because can be assured that the graduates of this school will immediately become the Chief of Police or other police officers who determine the policy.

B. Description

1. Writing the Module "Police and Protection of Religious Freedom", by PUSHAMs team, initiated with direct observational study at Police Academy, to assess the possibility to develop religious conflicts resolution curriculum. The writing itself requires a long process, after the module draft is completed, then PUSHAMs team discussed it in a workshop with Police Academy educators. After that, the module then revised and assessed by expert team from Center for the Study of Religion and Culture (CRSC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta and The Asia Foundation.
2. Module workshop, on 4-5 September 2012 at Santika Yogyakarta Hotel, attended thirty participants consist of Police Academy educators, tutors and instructors. The Asia Foundation Representative, and PUSHAMs researchers. This activity facilitated by PUSHAMs team and other resource persons, i.e. (1) Noor Huda Ismail (Prasasti Perdamaian Foundation), (2) Syamsu Rizal Panggabean (Peace and Conflict Resolution Master Program, Gadjah Mada University), and (3) Kombes Pol. Edward Syah Pernong (Head of Legal Department, Police Academy).
3. Training for Educators, on 12-14 November 2012 at Santika Yogyakarta Hotel, attended by twenty five Police Academy Educators. Invited resource persons are (1) Dr. Eric Hiariej, M.Phil (Vice Head for Center for Security and Peace Studies Gadjah Mada University),

Untuk mempercepat proses intervensi faham perlindungan kebebasan beragama ini kepada para pemimpin polisi maka dilakukan penjajakan kemungkinan memasukkan materi ini ke Sekolah Staf dan Pimpinan Polri Bandung melalui Lembaga Pendidikan Polisi di Jakarta. Karena dapat dipastikan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri ini akan langsung menjadi Kapolres atau perwira tinggi Polri lainnya yang menentukan kebijakan.

B. Deskripsi

1. Penulisan modul "Polisi dan Perlindungan Kebebasan Beragama". Modul ini ditulis oleh tim PUSHAM UII yang diawali dengan penelitian (*live in*) di Akpol untuk menjajagi kemungkinan pengembangan kurikulum konflik berbasis agama. Rute penulisan ini cukup panjang, setelah draft jadi, selanjutnya di workshop-kan dengan para pihak, khusus pengajar Akpol. Pasca workshop modul di revisi dan dibaca oleh tim ahli dari CRSC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan TAF.
2. Workshop Modul, kegiatan ini di selenggarakan tanggal 4-5 September 2012 di Hotel Santika, Yogyakarta. Peserta di ikuti oleh 30 peserta terdiri atas: tenaga pendidik, pengasuh dan pelatih Akpol, perwakilan TAF dan peneliti PUSHAM UII. Kegiatan ini difasilitasi oleh tim PUSHAM UII dan Narasumber diantaranya: (1) Noor Huda Ismail (Yayasan Prasasti Perdamaian), (2) Syamsu Rizal Panggabean (MPRK UGM), dan (3) Kombes Pol. Edward Syah Pernong (Kabid Hukum, Akpol).
3. Training Bagi Tenaga Pendidik (Gadik), kegiatan ini diselenggarakan tanggal 12-14 November 2012 di Hotel Santika, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan Gadik Akpol. Narasumber yang menjadi prasaran



yaitu: (1) Dr. Eric Hieraj (wakil kepala PSKP UGM), (2) Dr. M. Najib Azca (pengajar Sosiologi FISIPOL UGM), dan (3) Kombes Pol. Edward Syah Pernong (Kabid Hukum Akpol).

4. Assesment ke Lembaga Pendidikan Polisi Jakarta dan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri Bandung. Kegiatan ini telah di rintis dengan melakukan komunikasi ke sejumlah pihak.

C. Hasil

1. Telah tersusun modul "Polisi dan Perlindungan Kebebasan Beragama" yang akan dijadikan acuan dalam pelatihan bagi taruna Akpol terkait topik konflik dan kebebasan beragama.
2. Evaluasi kualitatif dari kedua workshop yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII dapat ditarik kesimpulan bahwa topik konflik dan kebebasan beragama adalah persoalan yang relatif baru bagi kepolisian dan ada keinginan dari peserta (Gadik Akpol) untuk mengintrodukirnya kedalam kurikulum formal di Akpol. Para peserta menyadari benar arti penting topik ini dalam tugas-tugas kewilayahan.
3. Assesment ke lembaga pendidikan Polisi dan Sespim telah membuka ruang komunikasi diantara pihak. Walau pun begitu, belum ada hal-hal strategis yang dilakukan.

1. Module "Police and Protection of Religious Freedom" is completed and to be used as a reference in the Police Academy cadets training for topics related to conflict and religious freedom.
2. Qualitative evaluation by PUSHAM draw conclusion that religious freedom and conflicts as relatively new issues for police and there is eagerness among Police Academy educators to introduce it to formal curriculum of Police Academy. They realize the true significance of this topic in their tasks.
3. Assesment to Police Education Institution Jakarta and School for Police Staff and Leader School Bandung has open the communication lane among related parties, yet, no strategic measures achieved.
4. Assesment to Police Education Institution Jakarta and School for Police Academy).
Kombes Pol. Edward Syah Pernong (Head of Legal Department, Police (2) Dr. M. Najib Azca (Sosiologi Lecturer, Gadjah Mada University), and (3) Staff and Leader School Bandung. This activity has been initiated by communicating to numbers of parties.

C. Results

Disabilities were varies, among them that renowned are physically disabled, blind, deaf, and mentally disabled. Each of them has different necessities and therefore their rights should be met according to their specific needs. Identifying and understanding their specific need is crucial so the public policy design would not partial, but universal. For example, persons that physically disabled, they need public space that has ramp with a slope of 1 : 12 between the high and the base, doors with a width of 90 cm, spacious toilets for wheelchair users to easily maneuver, and lower public telephone. For the visually impaired, the audio system is needed, such as talking elevator, buildings that have instructions in Braille, guiding blocks on public streets, Braille on keyboards, dots on mobile phones and others. For the hearing impaired, visualization is required, such as

As mentioned in Convention on the Rights of Persons with Disabilities, that persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. In Law Number 39 of 1999 on Human Rights and the International Convention, persons with disabilities placed as vulnerable groups whose rights are to be met specifically, and its existence should be affirmed in the policies.

A. Background

Focus Group Discussion: Advocacy Mechanism of Human Rights Organizations for Disabilities

Focus Group Discussion “Mekanisme Advokasi Lembaga-Lembaga HAM Bagi Difabel”

A. Latar Belakang

Difabel adalah singkatan dari *different ability people*, yaitu orang-orang yang berbeda kemampuan. Sebutan lainnya ialah *disable*, yang dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, dikaitkan dengan sekelompok manusia yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional, difabel ditempatkan sebagai kelompok rentan yang hak-haknya harus dipenuhi secara khusus, dan keberadaannya harus diafirmasi dalam kebijakan.

Difabilitas memiliki ragam yang berbeda, diantaranya yang terkenal tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, dan tuna grahita. Secara kebutuhan, ragam difabel tersebut berbeda, dan harus dipenuhi hak-haknya sesuai kebutuhannya masing-masing. Mengenali kebutuhan khusus masing-masing kelompok menjadi sangat penting sehingga desain kebijakan publik tidak parsial, tapi universal desain. Semisal, para tuna daksa, mereka membutuhkan ruang publik yang ada *ramp* dengan kemiringan 1 : 12 antara tinggi dan alas, pintu dengan lebar 90 cm, toilet yang lapang sesuai dengan kebutuhan manuver pemakai kursi roda, serta telepon umum yang rendah. Bagi tuna netra, yang dibutuhkan ialah sistem audio, seperti *talking lift*, arsitektur yang memiliki huruf *braille*, *guiding block* di jalan umum, huruf *braille* pada *keyboard*, titik pada telepon selular dan lainnya. Bagi tuna rungu yang dibutuhkan ialah visualisasinya, seperti bel peringatan kebakaran, lampu berkedip, bahasa isyarat dan *running text*. Sedangkan bagi tuna grahita yang diutamakan ialah keselamatan, maka yang dibutuhkan ialah pembuatan

bangunan yang tidak memiliki sudut tajam melainkan sudut tumpul. Fitur-fitur khusus ini dibutuhkan keberadaannya di ruang maupun fasilitas publik, sehingga keberadaannya harus menjadi desain universal yang tidak dikhususkan bagi difabel saja, melainkan juga dapat diakses bagi lansia, orang sakit, wanita hamil dan lain sebagainya.

Sayangnya, kebutuhan khusus bagi ragam difabel tersebut, saat ini masih belum terpenuhi dengan baik. Disana-sini masih belum *accessible*. Bangunan-bangunan publik, seperti kantor pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan umum dan transportasi umum, rata-rata masih belum *accessible* dan diskriminatif bagi para difabel. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan swasta seperti hotel, rumah ibadah, mall, dan lainnya, rata-rata semuanya masih belum bisa diakses oleh kaum difabel. Padahal, sebagian besar difabel seperti tuna daksa, tuna netra dan tuna rungu, mereka bukannya tidak memiliki kemampuan (*disability*), rata-rata mereka memiliki kemampuan, tapi karena ruang publik yang masih diskriminatif dan pola kebijakan yang masih belum afirmatif, akhirnya difabel terpinggirkan. Keberadaan mereka seringkali mengalami dehumanisasi, baik di level kebijakan maupun pranata sosial.

Terlanggarnya hak-hak difabel yang masih meluas hingga saat ini, adalah satu keprihatinan yang cukup mendalam. Bagaimana tidak? Pasca reformasi Indonesia, lembaga-lembaga hak asasi manusia telah bermunculan, bahkan sebelum reformasi 1998 terjadi, Komnas HAM telah terbentuk. Pemerintah juga telah memprogramkan Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) sejak 1998. Namun demikian, keberadaan difabel masih terus terpinggirkan. Mereka kehilangan hak-hak publiknya sebagai warga negara. Diskriminasi sistemik terus terjadi: mulai kebijakan negara yang masih belum humanis, sampai dengan pranata sosial masyarakat yang tidak memanusiaikan penyandang difabel. Saat ini, korban kekerasan begitu banyak, tapi lembaga hak asasi manusia tidak kunjung bergerak merespon. Beberapa kasus berhasil dilaporkan, tapi banyak hal yang

But the hope for change is certainly still exist, one of them, through advocacy. The victims and disabilities-concerned NGOs should be driven to understand the mechanisms of advocacy within human rights institutions, both at national and international level. In addition, institutions of human rights should be driven to be more responsive to the interests of the disabled. They should have a system that supports the fulfillment of rights for persons with disabilities.

In the post-reform period, the institutions of human rights have sprung. Even before the 1998 reform, the National Commission of Human Rights has been formed. The government also established National Rights Action Plan since 1998. Yet, the situation for disabled people is still unfavorable. Systemic discrimination continues to occur both in government and in society.

Unfortunately, the special needs for different disabilities, is still not well met. Public buildings, such as government offices, schools, colleges, hospitals, public roads and public transport, are still inaccessible and discriminatory for the disabled. Not only that, most of private buildings such as hotels, places of worship, shopping malls, and more, are still inaccessible for them. In fact, the majority of disabled people such as visual and audio impaired, not necessarily unable, but because public spaces are still discriminatory and public policies are not affirmative, then they are marginalized. They often experienced dehumanization, both at the level of policy and social institutions.

flashling fire alarm, sign language and running text. As for mentally disabled, safety is crucial, therefore buildings without sharp angles, is important. These special features are needed in public rooms and facilities, thus becoming a universal design that is not only reserved for the disabled, but also accessible for the elderly, the sick, pregnant women and others.

The FGD was successfully held on December 18, 2012 in PUSHAM UII. This activity only invite 15 people, which is representative of Riffka Annisa, Centre for Disability Studies and Services UIN Sunan Kalijaga, ICM, FH UII, Pusham UII, Yogyakarta Police Monitoring Network, and SIGAB.

C. Results

This event is a collaboration between PUSHAM UII, SIGAB and AIPJ, which discusses (1) the identification of human rights institutions that can assist disabled people fighting for their rights, (2) formulate advocacy mechanism, (3) discuss the design of collaborative advocacy among human rights institutions, NGOs and victims, (4) designing outline of guidebook of advocacy mechanism within human rights institutions for disabled people.

B. Description

Based on these ideas, Pusham UII in cooperation with SIGAB and Australia-Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ), held Focus Group Discussion (FGD) with the theme "Advocacy Mechanism within Human Rights Institutions for Persons with Disabilities". It discussed, (1) mapping of institutions of human rights that could help the disabled defend their rights, (2) formulate advocacy mechanism for persons with disabilities within institutions of human rights, and (3) formulate a collaborative design between human rights institutions with victims and NGOs engaged in disability issues.

ironis: terbentur hukum positif yang diskriminatif, perilaku sosial yang tidak adil, suara korban yang masih terlemahkan, dan isu difabel yang kalah prioritas daripada isu-isu yang lain.

Dengan suasana pemenuhan hak-hak difabel yang masih problematik, harapan perubahan itu tentu masih ada. Salah satu jalan itu adalah advokasi. **Pertama**, para korban dan NGO difabel harus didorong untuk mengerti mekanisme advokasi di lembaga-lembaga hak asasi manusia, baik di level nasional ataupun internasional. Advokasi difabel di jalur lembaga-lembaga hak asasi manusia sangat penting, karena praktek kekerasan yang terjadi pada difabel adalah sebetulnya pelanggaran hak asasi manusia, dimana kasusnya bisa diperkarakan sesuai hukum hak asasi manusia di lembaga peradilan dan/atau di lembaga hak asasi manusia. **Kedua**, selain korban yang harus diperkuat, lembaga-lembaga hak asasi manusia lewat beberapa pimpinannya harus didorong lebih responsif juga untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan para difabel. Lembaga-lembaga hak asasi manusia semestinya juga memiliki sistem yang bisa **mainstreaming** pemenuhan hak khusus bagi penyandang difabel. Kolaborasi lembaga-lembaga hak asasi manusia dengan korban dan NGO difabel harus diciptakan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Pusham UII bekerjasama dengan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ), menyelenggarakan **Focus Group Discussion** (FGD) yang bertemakan "**Mekanisme Advokasi Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia bagi Difabel**". Dalam diskusi ini akan dibahas, **pertama**, pemetaan lembaga-lembaga hak asasi manusia yang bisa digunakan para difabel untuk memperjuangkan hak-haknya. **Kedua**, merumuskan mekanisme advokasi difabel di lembaga-lembaga hak asasi manusia. **Ketiga**, merumuskan desain kolaborasi lembaga-lembaga hak asasi manusia dengan korban dan NGO yang bergerak di isu difabel.

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PUSHAM UII, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dan AIPJ. Kegiatan ini berbentuk *Focus Group Discussion* dan dipandu oleh satu orang fasilitator. Kegiatan ini mendiskusikan beberapa hal, yaitu (1) pemetaan lembaga-lembaga hak asasi manusia yang bisa dijadikan alat kaum difabel untuk memperjuangkan hak-haknya, (2) merumuskan mekanisme advokasi, (3) mendiskusikan perihal desain kolaborasi advokasi lembaga-lembaga HAM, NGO dan korban difabel, (4) adanya out line desain buku panduan mekanisme advokasi lembaga-lembaga HAM bagi difabel.

C. Hasil Kegiatan

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertemakan “*Mekanisme Advokasi Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia bagi Difabel*” berhasil diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2012, bertempat di kantor PUSHAM UII. Kegiatan ini hanya mengundang 15 orang. Hadir dalam pertemuan ini diantaranya, Musriyanti (Rifka Annisa), Andayani (Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN), Tri Wahyu (ICM), Nur Ismanto (Pengacara Senior), Mahrus Ali (FH UII), Eko Riyadi (Pusham UII), Kelik Sugiarto (Pusham UII), Sumiardi (Jaringan Pemantau Polisi Yogyakarta), M. Syafii'ie (Pusham UII), Purwanti (SIGAB), Soeharto (SIGAB), Neneng (SIGAB), dan Lutsfi (Pusham UII).

Kegiatan ini berhasil mensepakati empat hal: (1) disepakati untuk menggunakan kerangka 'rights based' untuk menganalisa isu difabel, (2) identifikasi lembaga-lembaga advokasi, baik lembaga negara, independen dan NGO, (3) akan didiskusikan mekanisme advokasi bagi difabel, (4) akan didiskusikan strategi-strategi advokasi. Setelah kesepakatan dicapai, berkembanglah diskusi antar peserta. Dalam perjalanan diskusi, peserta menilai bahwa topik advokasi bagi difabel ruang lingkupnya teramat besar, sehingga tidak mungkin meliputi semua persoalan difabel. Karena itu, topik mekanisme advokasi bagi difabel akhirnya

These activities agreed on four points: (1) the use of the 'rights-based' framework to analyze the issue of disability, (2) identification of advocacy agencies, state agencies, independent agencies and NGOs, (3) further discussion of the mechanism of advocacy for the disabled, (4) further discussion of advocacy strategies. Participants considered that the scope of advocacy for the disabled is very large, making it impossible to cover all the issues of disabilities. Therefore, the mechanism of advocacy for the disabled then confined to three sectors of rights which often faced by disabled people, namely the right to equal treatment before the law, the right to education and the right to work. The three rights then become main outline in the advocacy guidebook.

In the context of the work of the Judicial Commission, as has been stated by the Chairman of the Research and Development and Division of the National Judicial to fulfill the people's rights of justice.

the effects of this stagnation is distrust toward the state and all its institutions dead end, going nowhere and finally led to a never-ending frustration. One of many advocacy and monitoring works conducted by these institutions facing cases that often faced by the society. As a part of the process of the struggle, movements which more or less contribute in advocating and monitoring the fair trial. Their existence, with their own ways, has become civil society organizations are strategic in defending people's rights, including the rights for Organizations, Centers of Studies and Civil Society Organizations. These One of social element could not separated from society is Non Government be involved in monitoring the manners of judges.

A. Background

Mapping Research on Advocacy and Monitoring toward Clean Judiciary of Civil Society Movement in Yogyakarta

dibatasi pada tiga sektor hak yang sering dihadapi difabel, yaitu *pertama*, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; *kedua*, hak atas pendidikan; *ketiga*, hak atas pekerjaan. Tiga sektor hak itu pula yang kemudian menjadi *out line* besar dalam bahasan buku panduan advokasi.

Riset Peta Advokasi dan Monitoring Peradilan Bersih Gerakan Civil Society di Yogyakarta

A. Latarbelakang

Komisi Yudisial RI tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat. Komisi Yudisial tidak bisa bekerja sendiri, partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi satu yang sangat diperlukan. Tidak semata karena Komisi Yudisial menunggu terhadap berbagai laporan pelanggaran yang dilakukan para hakim terhadap masyarakat, tapi yang terpenting mengawasi hakim ialah bagian untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana telah diamanahkan dasar negara Pancasila. Putusan-putusan hakim yang menyimpang, sesungguhnya telah menciderai terhadap cita-cita bernegara yang telah lama dituliskan para *founding fathers*. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa masyarakat ialah mitra strategis Komisi Yudisial yang semestinya dirangkul, diajak dan ditetapkan sebagai bagian yang harus terlibat dalam mengawasi perilaku hakim.

Salah satu unsur sosial yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pusat Studi Kampus dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas), dimana keberadaan lembaga-lembaga itu sangat strategis dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang seringkali menjadi korban, tidak terkecuali berkaitan dengan hak keadilan yang terjadi di dunia peradilan. Keberadaan LSM, Pusat Studi Kampus dan Ormas tersebut dengan

caranya masing-masing telah menjadi gerakan *civil society* yang sedikit banyak telah berkontribusi dalam advokasi dan *monitoring* terhadap kasus-kasus yang sering dihadapi oleh masyarakat. Sebagai satu bagian dari proses perjuangan, tidak sedikit dari kerja-kerja advokasi dan *monitoring* yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut mengalami kebuntuan, berjalan di tempat dan berujung pada frustrasi yang tidak berkesudahan. Salah satu dampak dari kemandekan tersebut ialah ketidakpercayaan pada negara dan segenap institusinya untuk memenuhi hak-hak keadilan masyarakat.

Dalam konteks kerja-kerja Komisi Yudisial, sebagaimana pernah diungkap Ketua Litbang Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus bahwa dari 7.000 (tujuh ribu) hakim yang diawasi, telah masuk 1.509 (seribu limaratus sembilan) laporan ke Komisi Yudisial terkait dugaan hakim nakal. Pengakuan Jaja Ahmad Jayus memperlihatkan betapa antusiasnya masyarakat untuk melaporkan berbagai ketidakadilan yang menimpa mereka atau sosialnya. Angka tersebut dimungkinkan bertambah jika terdapat survei yang meluas ke seluruh pelosok nusantara. Masih banyak masyarakat yang sebenarnya menjadi korban, karena ketidaktahuan, mereka diam dan pasrah menerima keadaan yang seakan telah menjadi takdir. Mereka yang berani melapor, tentu karena mereka telah mempunyai pengetahuan, memiliki kesadaran hukum dan rata-rata mereka juga masih didampingi oleh para penasehat hukum. Walaupun, sangat disadari bahwa dari sekian laporan yang dikirim belumlah memenuhi standar pelaporan yang telah dibuat oleh Komisi Yudisial.

Berangkat dari pemikiran tersebut, PUSHAM UII tertarik untuk melakukan riset “*Peta Advokasi dan Monitoring Peradilan Bersih Gerakan Civil Society di Yogyakarta*”. Riset penting untuk mengetahui program, metode, instrumen dan varian metodologis lain yang menjadi basis advokasi dan *monitoring* peradilan bersih bagi gerakan sosial di Yogyakarta.

This study chose respondents from three main powers of civil society movements in Yogyakarta, namely NGOs, Social Organization, and the Centers of Studies within universities. There are four important questions that emphasized. First is the program of those three elements in support of a clean judiciary. Second is advocacy and monitoring methods that they employ. Third, the data collection, assistance and reporting methods for cases related to the justice system. Fourth is the map of their success and failure in performing advocacy and monitoring. This study used a qualitative descriptive analysis

B. Description

Based on these ideas, PUSHAM UII interested in doing research "Mapping the Advocacy and Monitoring Works for Clean Judiciary conducted by the Civil Society Movement in Yogyakarta". This research is important to know the programs, methods, instruments and other methodological variants that became the basis of advocacy and monitoring for clean judiciary by social movements in Yogyakarta.

Commission Jaja Ahmad Jayus, over seven thousand judges who supervised, one thousand five hundred nine reports were received by Judicial Commission related to alleged mischievous judges. The statement shows the enthusiasm of the public to report injustice. The figure above is possible to increase if there is a survey to the entire territory of Indonesia. There are still many people who actually are victims, but because they do not understand, they only be silent and accept it as their fate. Those who have the courage to report are those that have the knowledge and awareness of the law, despite still require legal counsel and the format has not met the standard sets by the Judicial Commission.

Research results for NGOs element are:

1. NGO programs related to judicial world is different to one another depend on each issue to be advocated.
2. Methods applied by the NGOs are litigation or non-litigation.
3. Methods of data collection and advocacy by NGOs differ from each other. Most of them do not have a standard data collection that can be used by the state to resolve certain case. Their standard data collection is incomplete and unsystematic. In fact there are some NGOs that do not have a data collection system. Case advocated only remembered, is not kept in

C. Results

The research was performed one month. There are several civil society organizations were successfully interviewed. From NGOs there are LBH Yogyakarta, ICM, Rifka Annisa, PKBI DIY, and UCP Untuk Roda Kemanusiaan DIY. From social organizations are LBH Anshor, Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Yogyakarta, Serikat Aktivis Pemuda Katolik (partner of PBKH Atmajaya Yogyakarta), Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) DPD Kota Yogyakarta, and **Majelis Mujahidin Indonesia. While from centers of Studies within universities, there is Center for Human Rights and Humanitarian Law Studies Widya Mataram University, Center for Human Rights and Democracy Studies Atma Jaya University, Center for Women Studies Islamic State University, Center for Anti Corruption Studies Gadjah Mada University and Center for Law and Constitution Studies Islamic University of Indonesia.**

method in which the data will be presented descriptively through elaboration and analyzed qualitatively (content analysis).

B. Deskripsi Kegiatan

Penelitian ini memilih responden tiga kekuatan besar gerakan *civil society* di Yogyakarta, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dan Pusat Studi Perguruan Tinggi. Rumusan pertanyaan penting yang kami cari adalah bagaimana program ketiga elemen tersebut di dunia peradilan bersih. **Kedua**, metode advokasi dan **monitoring** peradilan bersih yang mereka lakukan. **Ketiga**, metode pendataan, pendampingan dan pelaporan kasus yang berkaitan dengan persoalan peradilan. **Keempat**, peta keberhasilan dan kegagalan advokasi dan **monitoring** di peradilan. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dimana data yang ada akan disajikan secara deskriptif melalui penguraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*).

C. Hasil Kegiatan

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan. Terdapat beberapa lembaga *civil society* yang berhasil diwawancarai. Lembaga Swadaya Masyarakat, meliputi: LBH Yogyakarta, ICM, Rifka Annisa, PKBI DIY, dan UCP Untuk Roda Kemanusiaan DIY. Organisasi Masyarakat (Ormas), meliputi: LBH Anshor, Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Yogyakarta, Serikat Aktivis Pemuda Katolik (Mitra PBKH Atmajaya Yogyakarta), Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) DPD Kota Yogyakarta, dan Majelis Mujahidin Indonesia. Sedangkan dari Pusat Studi Perguruan Tinggi, meliputi: Pusat Studi Hukum HAM Dan Humaniter Universitas Widya Mataram, Pusat Studi HAM Dan Demokrasi (PSHD) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan Pusat Studi Hukum Dan Konstitusi (PSHK) UII.

Kesimpulan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat ialah, **pertama**, program LSM

yang berkaitan dengan dunia peradilan berbeda-beda. Masing-masing fokus terhadap isu masing-masing untuk diadvokasi. **Kedua**, metode advokasi dan **monitoring** yang dilakukan LSM memiliki dua kecenderungan, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. **Ketiga**, metode pendataan dan pendampingan LSM berbeda-beda. Mayoritas LSM masih belum memiliki standar pendataan yang bisa dipakai oleh negara dalam menyelesaikan kasus. Standar pendataan tidak lengkap, dan tidak sistematis. Bahkan, ada LSM yang tidak memiliki sistem pendataan. Kasus yang diadvokasi sekedar diingat dan tidak tertulis. Secara umum, pendataan LSM belum siap pakai dan dapat menjadi media data di peradilan. **Keempat**, secara umum, LSM kecewa terhadap dunia peradilan yang dianggap terlalu kaku dengan norma-norma legal, dan belum responsif terhadap kepentingan kemanusiaan. Dunia peradilan, khususnya pengadilan dinilai belum sensitif terhadap kelompok rentan, baik itu perempuan, anak-anak, gay, pekerja seksual, remaja jalanan, orang miskin dan penyandang disabilitas.

Kesimpulan Ormas ialah, **pertama**, ormas belum memiliki instrumen yang efektif dan profesional dalam melakukan pemantauan. **Kedua**, ormas sering bersentuhan dengan lembaga hukum atau peradilan tapi ormas tidak tahu lembaga-lembaga negara atau non negara yang bisa diajak untuk melakukan pemantauan bersama. **Ketiga**, ormas memiliki banyak program tapi jarang memiliki program pemantauan peradilan bersih, jikapun ada hanya bersifat sementara dan tidak terencana sebelumnya sementara para ormas ini sering kali menjadi tameng masyarakat untuk menghadapi kekuatan negara (lembaga peradilan). **Keempat**, ormas tidak bisa melakukan pemantauan peradilan sampai ke "dalam" karena merasa dirinya berada diluar negara sehingga ormas susah untuk menangkap siapa sebenarnya **invisible hand** dibalik sebuah kasus yang disidangkan. **Kelima**, ormas memiliki kelemahan dalam hal kemampuan melakukan investigasi.

1. They do not yet have effective and professional instruments in monitoring.
 2. They often deal with legal or judicial institutions but cannot identify the state or non-state institutions that can be inquired to conduct joint monitoring.
 3. They have a lot of programs but rarely have a clean judicial monitoring program, if any, is only temporary and unplanned, while these organizations often serve as a shield for the public when dealing with the judiciary.
 4. They are not able to monitor up to the innermost circle of justice because they are not part of state power so it is difficult to know the invisible hand behind a case to be tried.
 5. They have a weakness in terms of the ability to investigate.
- Research results for social organization element are:
1. In general, NGOs are disappointed with the judicial deemed too rigid with legal norms and unresponsive to the interests of humanity. Judicial world, particularly the courts, are considered insensitive to vulnerable groups such as women, children, gays, sex workers, street youth, the poor and people with disabilities.
 2. They do not yet have effective and professional instruments in monitoring.
 3. They have a lot of programs but rarely have a clean judicial monitoring program, if any, is only temporary and unplanned, while these organizations often serve as a shield for the public when dealing with the judiciary.
 4. They are not able to monitor up to the innermost circle of justice because they are not part of state power so it is difficult to know the invisible hand behind a case to be tried.
 5. They have a weakness in terms of the ability to investigate.
- written. In general, the data collection system owned by NGOs is not ready for use and cannot be used as the source of the data in the trial.

Research results for social Centers of Studies within universities are:

1. They are built based on the consideration of two things, namely anxiety over the problems faced by the community, and the potential for universities to play a role in the academic environment.
2. Programs that they do are very limited in scope. Social issues relating to justice then constructed into academic studies that produce output such as seminars, workshops, research and publishing journals.
3. In general, advocacy and monitoring method they use is sporadic and depend on public complaints. Advocacy they provide are varied, depending on the region and the potencies that allows them involved.
4. In general, their data collection methods are passive and not systematic. Assistance and reporting of cases by them is also very selective and passive.
5. In general, their work is not up to the technical level, so that the success or failure of a case really depends on the parties involved.

Sedangkan kesimpulan untuk Pusat Studi Perguruan Tinggi ialah, *pertama*, Pusat Studi dibangun berdasarkan pertimbangan dua hal, yaitu kegelisahan atas keadaan konkret dalam masyarakat yang bermasalah, serta potensi perguruan tinggi untuk berperan dalam lingkungan akademik. *Kedua*, program Pusat Studi bergerak dalam lingkungan yang amat terbatas. Isu dalam ranah sosial yang terkait peradilan dikonstruksikan menjadi kajian akademik yang menghasilkan keluaran program seminar, workshop, penelitian maupun penerbitan jurnal. *Ketiga*, secara umum, metode advokasi dan *monitoring* oleh Pusat Studi di lingkungan perguruan tinggi bersifat sporadik. Kegiatan itu tergantung pada adanya keluhan masyarakat yang masuk. Bentuk advokasi yang diberikapun beragam, tergantung pada wilayah dan potensi yang memungkinkan Pusat Studi terlibat. *Keempat*, metode pendataan yang dilakukan secara umum bersifat pasif dan tidak sistematis. Pendampingan dan pelaporan kasus yang dilakukan Pusat Studi juga sangat selektif dan bersifat pasif. *Kelima*, secara umum Pusat Studi tidak sampai pada tingkat teknis, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam permasalahan peradilan yang didampingi sangat tergantung pada para pihak yang terlibat.

Bagian Umum

Bagian Umum lebih banyak melaksanakan pemeliharaan inventaris kantor yang sudah dimiliki dan melakukan sedikit penambahan ataupun penggantian inventaris yang dipandang penting dan sangat dibutuhkan.

A. Buku

Hingga Desember 2012, perpustakaan PUSHAM UII telah memiliki koleksi sebanyak 2442 judul dengan penambahan baru sekitar 172 judul buku dari sebelumnya berjumlah 2270 judul pada tahun sebelumnya. Tahun ini, PUSHAM UII juga telah menerbitkan beberapa alat kampanye seperti buletin, majalah, dan komik yang telah disebarakan kepada beberapa pihak pengambil manfaat dari seluruh kegiatan PUSHAM UII. Ada pula beberapa buku yang juga telah diterbitkan, yaitu:

1. *Kisah-Kisah Pembebasan Dalam Al-Quran*
Penulis : Eko Prasetyo
2. *To Fulfill & To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*
Penulis : Ali Maskur dkk
3. *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*
Penulis : Yuli Asmara Triputra dkk
4. *Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya*
Penulis : Eko Riyadi dkk

B. Peralatan Kantor

Tahun ini, PUSHAM UII telah melakukan pembelian beberapa peralatan penunjang aktifitas kantor yang dirasa sangat penting untuk diadakan.

This year, PUSHAM UII has purchase some supporting equipment for office activities were deemed very important to be provided.

B. Office Equipment

1. *Literating Stories in Al-Quran*
By: Eko Prasetyo
2. *To Fulfill & To Protect: Overiewing Actual Cases of Human Rights*
By: Ali Maskur , et al
3. *To Promote: Overiewing The Development of Human Rights Discourse In Indonesia*
By: Yuli Asmara Triputra, et al
4. *Vulnerable Groups: Studies and mechanisms of Protection*
By : Eko Riyadi, et al

Until December 2012, the library has 2442 titles of book collection, with the addition of 172 new titles, adding up 2270 titles in the previous year. This year, PUSHAM UII has also published several campaign tools such as newsletters, magazines, and comics that have been distributed to beneficiaries of all projects. There are several books that have also been published, namely:

A. Book

and much needed.

General Affairs' activities are focused more on maintaining office inventories and supplies with several addition or replacement of inventory that is deemed important

Inventories

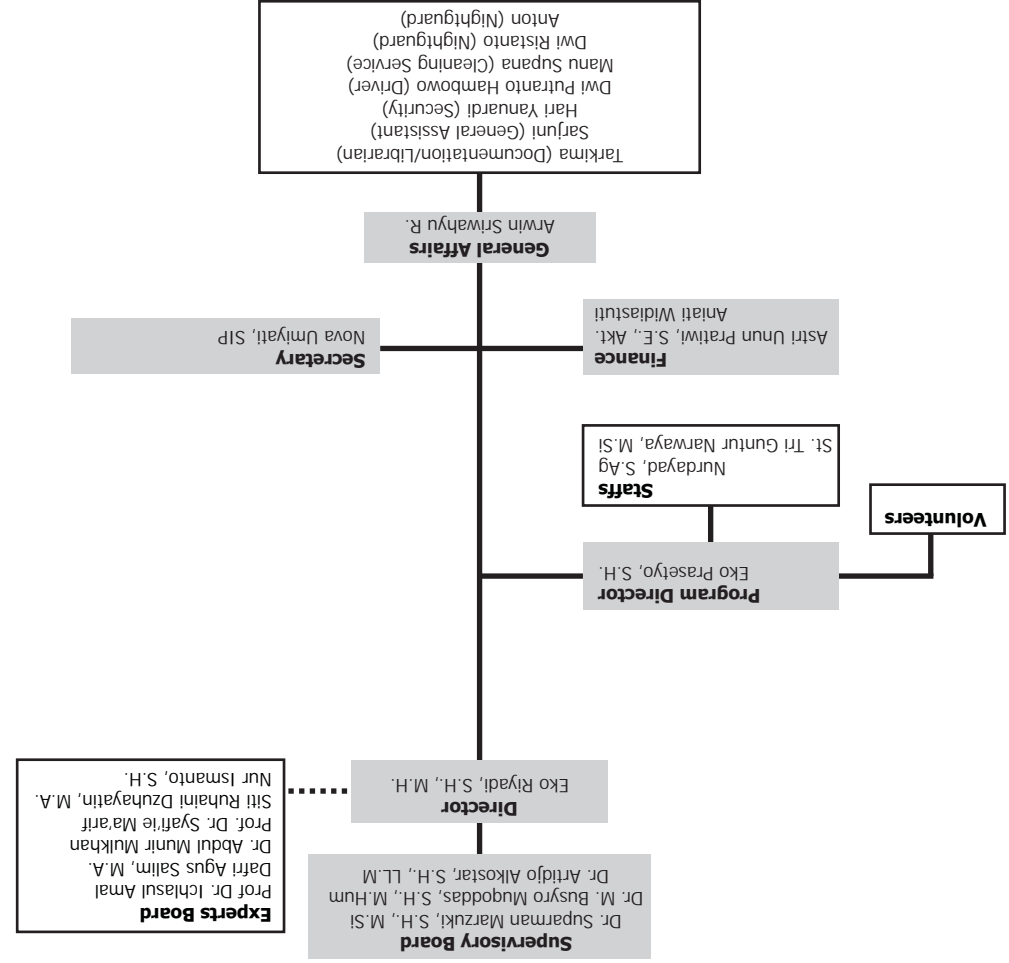
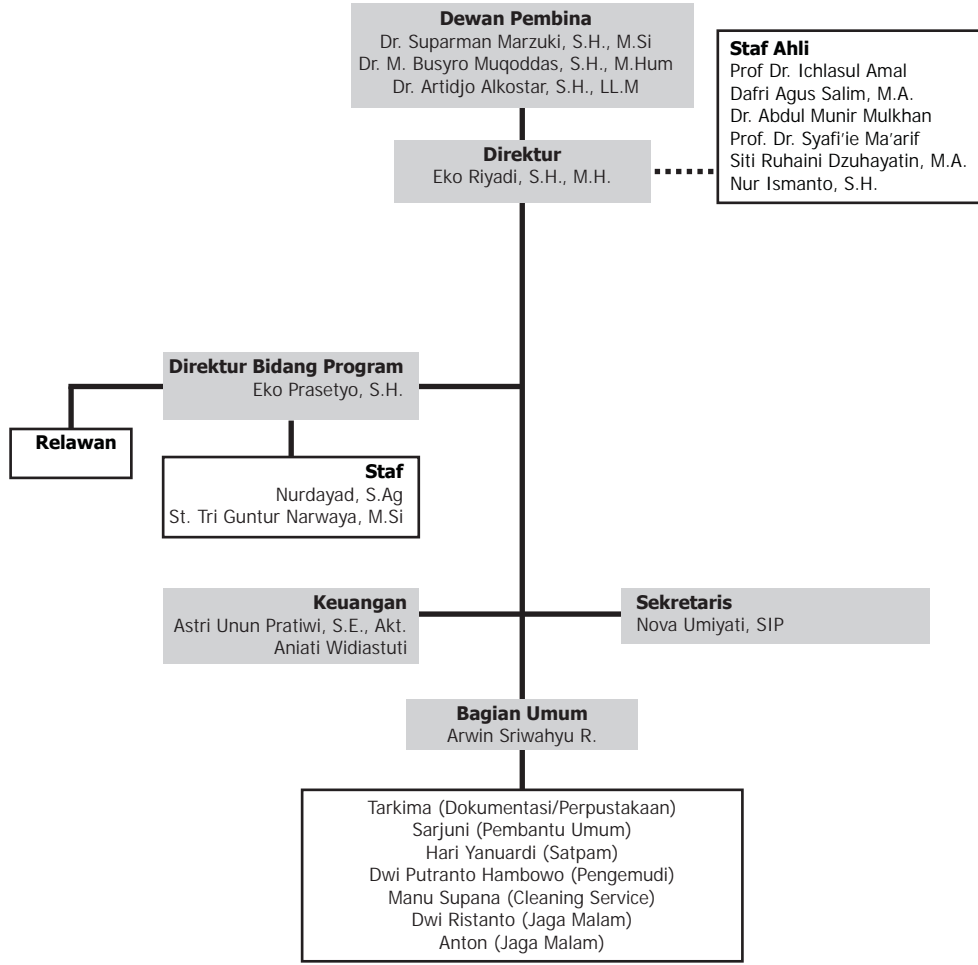
Program of Year 2012

| No. | Activities | Date | Venue | Participants | Source of Fund |
|-----|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1. | Strengthening Civic Values through Religious and Police Institutions in Indonesia | 1 January 2012-31 December 2012 | Yogyakarta and Central Java Province | Police Officials, Cadets, students, public | The Asia Foundation |
| 2. | Human Rights Training for Judges I & II: Supporting Judicial Institution in Protecting, Fulfilling and Respecting Human Rights | 28-31 May 2012 and 11-14 June 2012 | Jogja and Lombok | 60 Judges from Kalimantan, Maluku, Lombok, Bali, Java and Jakarta | NCHR University of Oslo, Norway |
| 3. | Seminar and Workshop Mainstreaming Corruption as a Violation of Human Rights | 15-16 May 2012 | Jogyakarta Plaza Hotel | Representatives of Academics, Court, Attorney, Police, NGOs | NCHR University of Oslo, Norway |
| 4. | Economic, Social and Cultural Rights Advanced | 9-11 October 2012 | Novotel Hotel Semarang | 40 Human Rights Law Lecturers | NCHR University of Oslo, Norway |
| 5. | Human Rights Intermediate Training | 6-8 November 2012 | Novotel Hotel Balikpapan | 40 Human Rights Law Lecturers | NCHR University of Oslo, Norway |
| 6. | Development of Online Library | March 2012 | - | Public | NCHR University of Oslo, Norway |
| 7. | Women's Rights and Religious Tolerance in Indonesia | 1 May 2012-30 April 2013 | Yogyakarta and Central Java Province | Police Officials from Police Academy and Institution | The Asia Foundation |
| 8. | Focus Group Discussion: Advocacy Mechanism of Human Rights Organizations for Disabilities | 18 December 2012 | Meeting Room, PUSHAM UII | 15 expert representatives of several human rights NGOs, academics | Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) |
| 9. | Mapping Research on The Activity and Work of Social Movement in Yogyakarta in Advocating and Monitoring the Judiciary System | February 2012 | Yogyakarta Province | NGOs, Centers of Studies, and Community Organizations in Yogyakarta Province | National Judicial Commission |

Realisasi Program Tahun 2012

| No. | Kegiatan | Waktu | Tempat | Peserta | Sumber Dana |
|-----|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1. | Memperkuat Nilai-Nilai Kewarganegaraan Melalui Institusi Keagamaan dan Kepolisian di Indonesia | 1 Januari 2012-31 Desember 2012 | DIY dan Jawa Tengah | Kalangan Kepolisian, taruna Akpol, mahasiswa, masyarakat umum | The Asia Foundation |
| 2. | Training HAM untuk Hakim I dan II: <i>Mendorong Lembaga Peradilan sebagai bagian dari upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia</i> | 28-31 Mei 2012 dan 11-14 Juni 2012 | Lombok dan Jogja | 60 hakim dari Kalimantan, Maluku, Lombok, Bali, Jawa dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta | NCHR Universitas Oslo, Norwegia |
| 3. | Seminar dan Workshop Promosi Anti Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia | 15-16 Mei 2012 | Hotel Jogjakarta Plaza Yogyakarta | Dekan Fakultas Hukum dari berbagai universitas | NCHR Universitas Oslo Norwegia |
| 4. | Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya | 9-11 Oktober 2012 | Hotel Novotel Semarang | 40 Dosen Pengajar Hukum dan HAM | NCHR Universitas Oslo, Norwegia |
| 5. | Intermediate Training Hak Asasi Manusia | 9-8 November 2012 | Hotel Novotel Balikpapan | 40 Dosen Pengajar Hukum dan HAM | NCHR Universitas Oslo, Norwegia |
| 6. | Pembuatan Perpustakaan Online | Maret 2012 | - | Umum | NCHR Universitas Oslo, Norwegia |
| 7. | Program Hak Wanita dan Toleransi Beragama di Indonesia | 1 Mei 2012-30 April 2013 | DIY dan Jawa Tengah | Kalangan kepolisian di lingkungan Akademi Kepolisian dan Lembaga Pendidikan POLRI | The Asia Foundation |
| 8. | Focus Group Discussion Mekanisme Advokasi Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia bagi Difabel | 18 Desember 2012 | PUSHAM UII | 15 orang ahli mewakili beberapa NGO HAM dan Difabel, akademisi | Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) |
| 9. | Riset Peta Aktifitas dan Kerja Gerakan Sosial di Yogyakarta dalam Advokasi dan Monitoring Dunia Peradilan | Februari 2012 | DIY | LSM, Pusat Studi dan Ormas di DIY | Komisi Yudisial RI |

Struktur Organisasi



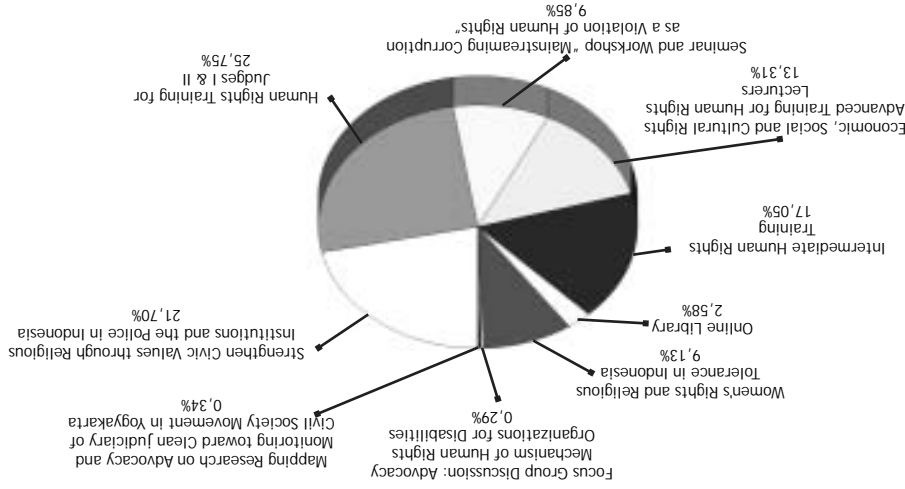
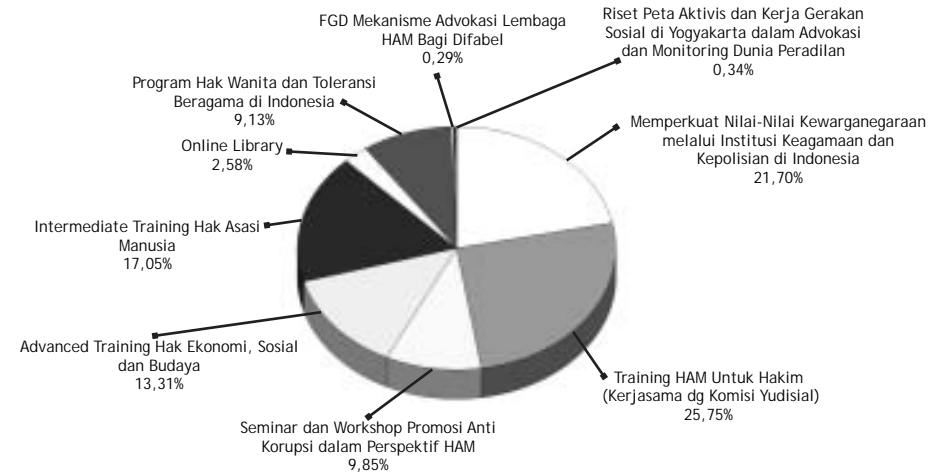
Organization Chart

Laporan Keuangan

Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Tahun 2012

| No. | Nama Proyek/Program | Lembaga Donor | Amount (Rp) | % ase | Jangka Waktu |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | Memperkuat Nilai-Nilai Kewarganegaraan melalui Institusi Keagamaan dan Kepolisian di Indonesia | TAF | 713.281.300 | 21,70% | Januari - Desember 2012 |
| 2. | Training HAM Untuk Hakim (Kerjasama dg Komisi Yudisial) | NCHR | 846.682.200 | 25,75% | Mei - Juni 2012 |
| | Seminar dan Workshop Promosi Anti Korupsi dalam Perspektif HAM | | 323.896.800 | 9,85% | 15 - 16 Mei 2012 |
| | Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 437.505.000 | 13,31% | 9 - 11 Oktober 2012 |
| | Intermediate Training Hak Asasi Manusia | | 560.374.500 | 17,05% | 6 - 8 November 2012 |
| | Online Library | | 84.960.000 | 2,58% | Mei - Desember 2012 |
| 3. | Program Hak Wanita dan Toleransi Beragama di Indonesia | TAF | 300.050.000 | 9,13% | Mei - Desember 2012 |
| 4. | FGD Mekanisme Advokasi Lembaga HAM Bagi Difabel | SIGAB | 9.575.000 | 0,29% | 18 Desember 2012 |
| 5. | Riset Peta Aktivistis dan Kerja Gerakan Sosial di Yogyakarta dalam Advokasi dan Monitoring Dunia Peradilan | Komisi Yudisial | 11.220.000 | 0,34% | Januari - Desember 2012 |
| TOTAL | | | 3.287.544.800 | 100,00% | |

Prosentase Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Tahun 2012



Project Fund Managed Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia Year 2012

| No. | Project Title | Donor Agency | Amount (Rp) | % age | Period |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | Strengthen Civic Values through Religious Institutions and the Police in Indonesia | TAF | 713.281.300 | 21,70% | January - December 2012 |
| 2. | Human Rights Training for Judges I & II | NCHR | 846.682.200 | 25,75% | May - June 2012 |
| | Seminar and Workshop "Mainstreaming Corruption as a Violation of Human Rights" | | 323.896.800 | 9,85% | 15 - 16 May 2012 |
| | Economic, Social and Cultural Rights Advanced Training for Human Rights Lecturers | | 437.505.000 | 13,31% | 9 - 11 October 2012 |
| | Intermediate Training Human Rights Training | | 560.374.500 | 17,05% | 6 - 8 November 2012 |
| | Online Library | | 84.960.000 | 2,58% | May - December 2012 |
| 3. | Women's Rights and Religious Tolerance in Indonesia | TAF | 300.050.000 | 9,13% | May - December 2012 |
| 4. | Focus Group Discussion: Advocacy Mechanism of Human Rights Organizations for Disabilities | SIGAB | 9.575.000 | 0,29% | 18 December 2012 |
| 5. | Mapping Research on Advocacy and Monitoring toward Clean Judiciary of Civil Society Movement in Yogyakarta | Judicial Commission | 11.220.000 | 0,34% | January - December 2012 |
| TOTAL | | | 3.287.544.800 | 100,00% | |

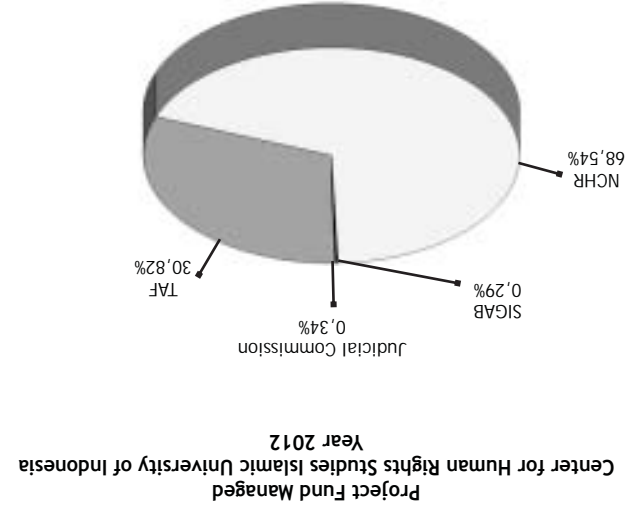
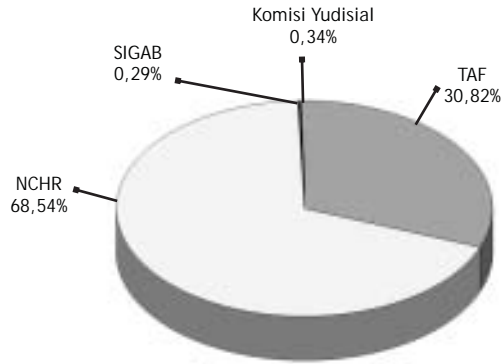
Financial Statement Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia Year 2012

Financial Statement

**Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Tahun 2012**

| No. | Nama Proyek/Program | Lembaga Donor | Jumlah Dana Dikelola (Rp) | Sub Total | % ase |
|--------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------|---------|
| 1. | Memperkuat Nilai-Nilai Kewarganegaraan melalui Institusi Keagamaan dan Kepolisian di Indonesia | TAF | 713.281.300 | 1.013.331.300 | 30,82% |
| | Program Hak Wanita dan Toleransi Beragama di Indonesia | | 300.050.000 | | |
| 2. | Training HAM Untuk Hakim (Kerjasama dg Komisi Yudisial) | NCHR | 846.682.200 | 2.253.418.500 | 68,54% |
| | Seminar dan Workshop Promosi Anti Korupsi dalam Perspektif HAM | | 323.896.800 | | |
| | Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 437.505.000 | | |
| | Intermediate Training Hak Asasi Manusia | | 560.374.500 | | |
| | Online Library | | 84.960.000 | | |
| 3. | FGD Mekanisme Advokasi Lembaga HAM Bagi Difabel | SIGAB | 9.575.000 | 9.575.000 | 0,29% |
| 4. | Riset Peta Aktivistis dan Kerja Gerakan Sosial di Yogyakarta dalam Advokasi dan Monitoring Dunia Peradilan | Komisi Yudisial | 11.220.000 | 11.220.000 | 0,34% |
| Total | | | 3.287.544.800 | 3.287.544.800 | 100,00% |

**Prosentase Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Tahun 2012**



| No. | Project Title | Donor Agency | Fund Managed (Rp) | Sub Total | % ase |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 1. | Strengthen Civic Values through Religious Institutions and the Police in Indonesia | TAF | 713.281.300 | 1.013.331.300 | 30,82% |
| | Women's Rights and Religious Tolerance in Indonesia | | 300.050.000 | | |
| 2. | Human Rights Training for Judges I & II | NCHR | 846.682.200 | 2.253.418.500 | 68,54% |
| | Seminar and Workshop "Mainstreaming Corruption as a Violation of Human Rights" | | 323.896.800 | | |
| | Economic, Social and Cultural Rights Advanced Training for Human Rights Lecturers | | 437.505.000 | | |
| | Intermediate Human Rights Training | | 560.374.500 | | |
| | Online Library | | 84.960.000 | | |
| | Focus Group Discussion: Advocacy Mechanism of Human Rights Organizations for Disabilities | | 9.575.000 | | |
| 3. | Mapping Research on Advocacy and Monitoring toward Clean Judiciary of Civil Society Movement in Yogyakarta | Judicial Commission | 11.220.000 | 11.220.000 | 0,34% |
| Total | | | 3.287.544.800 | 3.287.544.800 | 100,00% |

**Financial Statement
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia
Year 2012**

Laporan Tahunan

2013

1 Januari - 31 Desember 2013



January 1 - December 31, 2013

2013

Annual Report



The training took place on 10-13 September 2013 at the Police Academy. The training was attended by 392 cadets, divided into 10 classes. This training invited speakers from victims as well as experts in human rights, social analysis, community policing and gender.

of Police Academy

1. Human Rights and Community Policing Training for Detachment 46 Cadets

B. Description

The focus of this year's activities is the improvement of the police institution at academy level to change the mindset and the curriculum to be more sensitive to human rights and applicable in the field. In addition to the Police Academy, Pusham UII also targeting Yogyakarta Provincial Police and campuses, in conjunction with publications as campaign media to accelerate reform police.

This program in hopes of changing the pattern of police policies and habits for corruption. This year Pusham UII still implements instance poor public services, violence and rights committed by members of the police, for violations both of the code of ethics and human improved, but no doubt there are many The process of police reform was increasingly



A. Background

Strengthen Civic Values through Religious Institutions and the Police in Indonesia

Programs

Program

Memperkuat Nilai-Nilai Kewarganegaraan Melalui Institusi Keagamaan dan Kepolisian di Indonesia

A. Latarbelakang



Perjalanan reformasi Polri kian hari kian membaik, namun tidak dipungkiri masih banyak pelanggaran-pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota Polri seperti kasus pelayanan masyarakat, kekerasan sampai dengan korupsi.

Tahun 2013 ini Pusham UII masih mengawal Program COP dengan harapan dapat mengubah pola kebijakan maupun kebiasaan Polri menjadi lebih baik.

Fokus yang diambil pada tahun 2013 ini adalah melalui perbaikan institusi Polri di tingkat pendidikan akademi untuk mengubah pola pikir dan kurikulum pendidikan Polri agar peka terhadap hak asasi manusia dan mampu diaplikasikan di lapangan. Selain di lingkungan Akademi Kepolisian, Pusham UII juga menasar Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan lingkungan kampus di Yogyakarta disamping penerbitan publikasi sebagai kampanye percepatan reformasi Polri.

B. Kegiatan

1. Pelatihan HAM dan Polmas bagi Taruna Detasemen 46 Akademi Kepolisian Semarang

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 10-13 September 2013 di Akademi Kepolisian diluar waktu belajar mengajar Akademi. Pelatihan diikuti oleh 392 taruna/i yang terbagi menjadi 10 kelas. Pelatihan dilakukan dengan mendatangkan narasumber dari korban dan juga para pakar hak asasi manusia, analisa sosial, perpolisian masyarakat dan gender.

2. Riset Alumni Angkatan 2006-2010, Gambaran Pemahaman dan Penerapan Nilai-Nilai HAM dan Polmas dalam Praktek Kinerja Lulusan Akpol Angkatan 2006-2010

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan bersama dengan tim dari Akpol. Riset ini dilaksanakan pada tanggal 20-24 Mei 2013 dengan tujuh Polda sebagai sasaran riset, yaitu Polda Metro Jakarta, Polda Lampung, Polda Jawa Timur, Polda Bangka Belitung, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sulawesi Tenggara dan Polda Sumatera Utara.

Hasil dari riset ini adalah pada umumnya para alumni berpendapat bahwa (1) materi hak asasi manusia yang diberikan di Akpol masih belum maksimal, teoritis dan kurang aplikatif, (2) pendidikan di Akpol kurang optimal karena tidak aplikatif dan sesuai dengan kasus-kasus lapangan yang dihadapi, (3) merasa kurang siap ketika berhadapan dengan kasus-kasus bernuansa politik.

3. Pelatihan untuk Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian, Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Sumber Daya Alam dengan Perspektif HAM Relasi Dinamika Ekonomi dan Problem Keamanan

Tema ini dipilih sebagai tindak lanjut riset alumni yang menunjukkan bahwa banyak masalah sumber daya alam di wilayah yang melibatkan polisi sementara masih sedikit aparat kepolisian yang mengerti kasus tersebut. Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 18-20 September 2013 di Hotel Santika Semarang dan diikuti oleh 25 orang Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian Semarang.



4. Pelatihan HAM untuk Tenaga Pelatih Akademi Kepolisian

Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 17-20 Desember 2013 bertempat

2013 in Semarang and attended by 25 Educators of Police Academy.



This theme was chosen in order to follow up the results of research on alumni which showed that many problems and cases of natural resources are involving police while they lack understanding on that. This training was held on 18-20 September

3. Training for Police Academy Educators, The Role of Police in Handling Natural Resources Conflicts with the Human Rights Perspective: Relations between Economic Dynamics and Security Problem

The results of this research are generally felt that (1) human rights subjects which are given in the Police Academy is insufficient because it is not applicable and does not correspond to the real cases as encountered, (3) feel less prepared when dealing with political cases.

It is a routine activity that is conducted together with the Police Academy Team. Research was conducted on 20-24 May 2013 with seven Provincial Police as research target, namely Jakarta, Lampung, East Java, Bangka Belitung, Central Kalimantan, Southeast Sulawesi and North Sumatra.

2. Research on Comprehension and Application of Human Rights and Community Policing Values in Police Academy Graduates 2006-2010 Performance

This research was conducted on March 4 to May 31, 2013, in three areas,

7. Research on Protection of Minorities and Public Service Survey

implementing the research.

The training took place on 23-25 February 2013 and attended by 19 participants. This training aims to open up the knowledge of participants so that they are able to determine the appropriate strategies when implementing the research.

Minorities and the Public Service Survey

6. Training for Research Team in conducting Research on the Protection of

cooperation.

Islamic University of Indonesia. The workshop was conducted as an evaluation of the existing cooperation and develops other possible



Held on 8-9 October 2013 in Semarang, the event was preceded by the signing of the Memorandum of Understanding between the Islamic University of Indonesia and the Police Academy for the period 2013 to 2018 by Governor of Police Academy and Vice Rector of

Police Academy

5. Evaluation Workshop of Partnership Program between Pusham UII and

their daily tasks.

This training was held on 17-20 December 2013 in Semarang, which was attended by 29 Police Academy Trainers. This training was essential to provide the knowledge, understanding of human rights and its application in

4. Human Rights Training for the Police Academy Trainers

di Hotel Santika Semarang yang dihadiri oleh 29 Tenaga Pelatih Akademi Kepolisian. Pelatihan ini penting untuk memberikan pengetahuan, pemahaman hak asasi manusia dan penerapannya dalam tugas sehari-hari.

5. Workshop Evaluasi Program Kemitraan Pusham UII dan Akademi Kepolisian

Diadakan pada tanggal 8-9 Oktober 2013 di Hotel Santika Premiere Semarang. Acara ini didahului dengan penandatanganan Naskah Kerjasama antara Universitas Islam Indonesia



dan Akademi Kepolisian periode 2013-2018 yang langsung dihadiri oleh Gubernur Akademi Kepolisian dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia. Workshop ini dilaksanakan sebagai evaluasi atas kerjasama yang sudah berjalan dan mengembangkan kemungkinan kerjasama yang lain.

6. Pelatihan Tim Peneliti untuk Penelitian Perlindungan Kaum Minoritas dan Survey Layanan Publik

Pelatihan ini dilaksanakan tanggal 23-25 Februari 2013 dan diikuti oleh 19 peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk membuka pengetahuan peserta dan mampu menentukan strategi yang perlu dilakukan ketika menghadapi polisi di lapangan ketika riset.

7. Penelitian Perlindungan Kaum Minoritas dan Survey Layanan Publik

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Maret-31 Mei 2013, di tiga wilayah Polres yaitu Polres Sleman, Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, partisipasi, dan triangulasi sumber data.

8. FGD Penelitian Perlindungan Kaum Minoritas dan Survey Layanan Publik

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan mengenai hasil riset di tiga wilayah Polres untuk penyempurnaan sebelum dipresentasikan

dalam seminar. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2013 di Pusham UII.

9. Seminar Hasil Riset Perlindungan Kaum Minoritas dan Survey Layanan Publik di Wilayah Polda DIY

Hasil riset yang diteliti didapatkan dan disempurnakan dalam FGD, kemudian dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan pada tanggal 23-24



Juli 2013 di Hotel Santika Yogyakarta serta dihadiri oleh 44 Peserta dari kepolisian dan tokoh masyarakat. Rekomendasi dari riset ini adalah pentingnya transparansi dalam menyelesaikan kasus, keseriusan pemberantasan pungli, perlu adanya UPPA di tingkat polsek, perlunya peningkatan pemahaman polisi tentang gender, dan menyelesaikan kasus Irsyad Manji sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Workshop Kelompok Strategis I, Peran Polisi dan Masyarakat dalam Menangani Kasus Kekerasan

Workshop ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran mengenai penanganan kasus kekerasan baik dari perspektif kepolisian maupun masyarakat yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Workshop ini diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 19-20 Februari 2013 dan dihadiri oleh 27 peserta.

11. Workshop Kelompok Strategis II, Eksistensi Milisi Sipil dan Memudarnya Tanggungjawab Aktor Negara

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang keberadaan milisi sipil khususnya yang terlibat dalam kasus kekerasan serta mengetahui kebijakan penegak hukum (Polri) dalam menangani kasus yang

February 2013 and was attended by 27 participants.

accordance with human rights principles. This workshop was held on 19-20 violence cases both from the perspective of the police and the community in This workshop is undertaken to obtain an overview on the handling of

Addressing Violence

10. Workshop for Strategic Group I, Role of the Police and the Community in

improved understanding of the police on gender.

illegal levies, the need for UPPA at the police station, and the need for of transparency in resolving the case, the seriousness of the eradication of community leaders. Recommendations from this research is the importance July 2013 and was attended by 44 participants from the police and



then presented in a seminar held on 23-24 refined in the focus group discussion, and The results of the research that have been the Public Service Survey in Yogyakarta

Research on Protection of Minorities and the Results of

9. Seminar on Presentation of the Results of

was held on June 4, 2013.

improvement before the results were presented in the seminar. The event This event was held to get feedback on the results of research for the

Public Service Survey

8. Focus group discussion for Research on Protection of Minorities and the

participation methods and data triangulation.

namely Sleman, Bantul and Yogyakarta. This research used qualitative and

This activity is undertaken to understand the background of this case, and its prevention as well as anticipation through a partnership between school, the police and the community. The event was organized by the Center for Human Rights and Democracy (PSHD) Atmajaya University and Pusham UII on

Cases

14. Public Lecture on Campus II, Police Role in Resolving Student Bullying
Library and was attended by 76 participants.

Sunan Kalijaga on March 21, 2013 at Discussion Room of UIN Sunan Kalijaga with such conflict. This event was organized in collaboration with HMI UIN This forum is discussing military-police conflicts that arise along with the causing factors, as well as the position of the student community in dealing

Solutions

13. Public Lecture on Campus I, Military-Police Conflict: Finding Roots and
29-30 October 2013.

This work was conducted to find out the Yogyakarta Police policy against Udin case which nearly expired as well as seeking advocacy formulation that can be used to unravel this case. This workshop was held on



12. Workshop for Strategic Group III, Settlement Direction of Udin Case
was attended by 21 participants.

This activity is undertaken to obtain an overview about the existence of civil militia particularly those involved in cases of violence and to know the police policies in handling cases involving civilian militia. This workshop was held at the Hotel Santika Premiere Yogyakarta on 3-4 September 2013 and

State's Responsibility

11. Workshop for Strategic Group II, Existence of Civil Militia and the Fading

melibatkan milisi sipil. Workshop ini diselenggarakan di Hotel Santika Yogyakarta pada tanggal 3-4 September 2013 dan dihadiri oleh 21 peserta.

12. Workshop Kelompok Strategis III, Kemana Arah Penegakan Hukum Kasus Udin



Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui kebijakan Polda DIY akan proses hukum terhadap kasus Udin yang hampir kadaluarsa dan mencari formulasi advokasi yang dapat digunakan aparat penegak hukum dalam

mengungkap kasus tersebut. Workshop ini diselenggarakan pada tanggal 29-30 Oktober 2013 di Hotel Santika Yogyakarta.

13. Kuliah Umum di Kampus I, Konflik TNI Polri: Mencari Akar dan Solusi Konflik

Forum ini mendiskusikan konflik TNI-Polri yang muncul dan faktor penyebab munculnya konflik ini dan posisi masyarakat terutama mahasiswa dalam menghadapi konflik tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan HMI UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 21 Maret 2013 di Ruang Diskusi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan dihadiri oleh 76 peserta.

14. Kuliah Umum di Kampus II, Peran Polisi dalam Penyelesaian Kasus Bullying Pada Pelajar dan Mahasiswa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memahami latar belakang adanya kasus ini, dan penanggulangan serta antisipasinya melalui kemitraan antara kampus/sekolah, kepolisian dan masyarakat. Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Studi HAM dan Demokrasi (PSHD) Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Pusham UII ini dilaksanakan pada 6 September 2013 di Ruang Meeting Kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta dan dihadiri oleh 77 peserta.

15. Seminar dan Regional Meeting di Kampus, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Keamanan dan HAM di Indonesia*

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengajak para mahasiswa untuk berpikir kritis dan dapat ikut berperan serta dalam penegakan hukum dengan mengawasi pelaksanaannya. Seminar ini diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2013 serta dihadiri oleh 69 peserta.

16. Publikasi

- a. Majalah Pledoi Edisi 4, Juli-Agustus 2012, *Difabel Yang Terlupakan*, 500 eksemplar.
- b. Majalah Pledoi Edisi 5, September-Oktober 2012, *Pendidikan di Kepolisian*, 500 eksemplar.
- c. Majalah Pledoi Edisi 6, November-Desember 2012, *Awasi Penyalahgunaan Wewenang Polisi*, 500 eksemplar.
- d. Buku Hasil Riset Kelompok Minoritas di Yogyakarta, *Perlindungan Polisi terhadap Kaum Minoritas dan Pelayanan Publik di wilayah DIY*, 500 eksemplar.
- e. Komik *Menagih Tanggung Jawab Polisi untuk Alm. Udin*, 500 eksemplar.
- f. Komik *Eksistensi Milisi Sipil dan Memudarnya Tanggungjawab Aktor Negara*, 500 eksemplar.
- g. Cetak Ulang Modul Pelatihan, Taruna *Kamilah Polisi-Polisi Masa Depan*, 500 eksemplar.
- h. Komik *Saatnya Polisi Berubah*, 500 eksemplar.

- 6 September 2013 in the Meeting Room of Atmajaya Yogyakarta University Campus and was attended by 77 participants.
- 15. Seminar and Regional Meeting at Campus, Law Enforcement and in the Perspective of Security and Human Rights in Indonesia**
- This activity is undertaken to encourage students to think critically and be able to participate in law enforcement by overseeing its implementation. The seminar was held at the Faculty of Law, Islamic University of Indonesia Yogyakarta on June 22, 2013 and attended by 69 participants.
- 16. Publication**
- a. *Pledoi Magazine 4th Edition, July-August 2012, Forgotten Disabilities*, 500 copies.
 - b. *Pledoi Magazine 5th Edition, September-October 2012, Education in Police Academy*, 500 copies.
 - c. *Pledoi Magazine 6th Edition, November-December 2012, Watch the Police Abuse of Power!* 500 copies.
 - d. Research Results Publication on Minority Groups in Yogyakarta, *Police Protection toward Minority Group and Public Service in Yogyakarta*, 500 copies.
 - e. Comic Book on *Demanding Police's Responsibility for Deceased-Udin*, 500 copies.
 - f. Comic Book on *Existence of Civil Militia and the Fading States Responsibility*, 500 copies.
 - g. Re-printing Training Module for Cadets, *We Are the Future Police*, 500 copies.
 - h. Comic Book on *It is time for the Police to Change*, 500 copies.

rights perspective, as the main concern of Pusham Ull institutionally. corruption training for judges throughout Indonesia. The approach is human Commission and NCHR University of Oslo Norway held human rights and From these thoughts, Pusham Ull collaborated with National Judicial explored and sentenced with a fair punishment.

strengthened is the judge, because in their hands, corruption cases can be social and human rights impacts. One of the law enforcers who must be law enforcers in defining corruption as well as has the ability to explore the sentenced by severe and deterrent punishment. For that, it takes progressive highly harmful action for human beings. Perpetrators of corruption should be can be done. One is the strengthening of the perspective that corruption is a This poor condition requires constant resistance. There are many steps that remain untouched.

Ecuador, Egypt and Madagascar where corruption continues to grow and with Albania, Ethiopia, Guatemala, Nigeria, East Timor, Dominican Republic, report, Indonesia ranks 118, along Transparency International's 2012 but also spread over local levels. In happening at the national level, more serious, because it is not just Corruption in Indonesia is become



A. Background

Promote Judiciary Institution in Eradicating Corruption for the Fulfillment of Human Rights

Pengarusutamaan Pendekatan HAM dalam Pemberantasan Korupsi

A. Latar Belakang



Korupsi merupakan peristiwa yang sangat serius di Indonesia. Keberadaannya semakin merajalela. Tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah. Dalam laporan Transparansi Internasional tahun 2012, negara Indonesia berada di rangking 118, setara dengan Albania, Ethiopia, Guatemala, Nigeria, Timor Leste, Republik Dominika, Ekuador, Mesir dan Madagaskar dimana perilaku korupsi terus membesar dan tidak terjamah.

Praktek korupsi yang memprihatinkan, membutuhkan perlawanan yang terus-menerus. Ada banyak langkah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah penguatan perspektif bahwa korupsi merupakan tindakan yang sangat membahayakan bagi umat manusia. Pelaku korupsi mesti diganjar dengan hukuman yang berat dan menjerakan. Untuk itu, dibutuhkan para penegak hukum yang progresif dalam memaknai korupsi serta memiliki kemampuan menggali dampak-dampak sosial serta pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu penegak hukum yang mesti diperkuat adalah hakim. Di tangan mereka, realitas yang berkaitan dengan korupsi digali dan diputuskan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Pusham Ull bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR Universitas Oslo Norwegia menyelenggarakan pelatihan bagi hakim seluruh Indonesia tentang tindak pidana korupsi. Pendekatannya adalah hak asasi manusia sebagaimana menjadi konsen kelembagaan Pusham Ull.

B. Deskripsi

Pelatihan ini diselenggarakan dengan model ceramah dan dialog. Pembicara menyampaikan materinya dan terbuka bagi para peserta untuk langsung mengomentari dan bertanya kepada pembicara. Selain itu, peserta dalam beberapa sesi diminta menyaksikan film dokumenter yang menceritakan tentang praktek korupsi dan kaitan serta dampaknya terhadap hak asasi manusia.

C. Hasil

Pelatihan pengarusutamaan pendekatan hak asasi manusia dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2013 ini diselenggarakan dua kali. Materi yang diberikan adalah berkaitan dengan penanganan korupsi dengan menggunakan pendekatan hak asasi



manusia. Pembicara yang didatangkan adalah dari KPK, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, pegiat anti korupsi, pegiat hak asasi manusia dan beberapa pembicara berkompeten dari dalam dan luar negeri.

Pelatihan pertama diselenggarakan pada 17-20 Juni 2013 bertempat di Bali dan diikuti oleh 30 hakim dari berbagai daerah diluar Jawa. Sedangkan pelatihan yang kedua diselenggarakan pada 18-21 November 2013 bertempat di Santika Premiere Jogja dan diikuti oleh 30 hakim dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Materi dan pembicara dalam pelatihan ini adalah sama dengan pelatihan pertama.

The first training was held on June 17-20, 2013 in Bali and attended by 30 judges from various regions outside Java. The second training was held on November 18-21, 2013 in Jogjakarta and was attended by 30 judges from various regions within Java. The materials and speakers of each training are the same.



This year, the training was organized twice. The material provided is handling corruption using human rights approach. The speakers who give presentations are representatives from KPK, National Judicial Commission, Supreme Court, anti-corruption activists, human rights activists and several competent national and international speakers.

B. Description

The training uses lecture and dialogue models. Speakers convey their presentation and are open for participants to directly give their comments and questions. In addition, participants also asked to watch a documentary film about corruption and its relations and impacts on human rights.

C. Results

international level, this debates then addressed by UN by appointing Professor Those cases then inspired many to consider law on business and human rights. In Sidoarjo, East Java.

West Lombok conflict, Mesuji Lampung case and Lapindo Brantas Mud disaster in and Kamoro Tribes caused by exploration of PT. Freeport in Papua; Sape Harbor Minahasa Raya in Sulawesi; allegation of human rights violation toward Amungme especially, there are several cases, such as Buyat Bay pollution by PT. Newmont Myanmar, Blood Diamond case in South Africa and may other cases. In Indonesia are Bopal case in India, military involvement in gas mining in Aceh Indonesia and potencies toward human rights violations. Several cases that could be referred policies became important issue in many academic discussions, moreover on its entities became common. Influence of international business deals toward state but also business entities. Fighting over influences between state and business worldwide. World order especially in 1990s, were dominated by not only the state Such arguments stimulated by condition where business entities were expanding to protect and obligation to respect.

Lately, arguments on human rights both nationally and internationally enriched by the idea of entitlement of human rights obligations to corporations and/or business institutions. This developed from previous idea where only state entity who entitled with human rights obligations. Those obligations are obligation to fulfill, obligation



A. Background

Legal Audit of Indonesian Business Law and Policy in Compliance with Human Rights Principles

Riset Analisis Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan dan Perkebunan terhadap Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

A. Latarbelakang



Akhir-akhir ini, perdebatan mengenai hak asasi manusia, baik pada level nasional maupun internasional, disemarakkan oleh ide pemberian kewajiban hak asasi manusia (*human rights obligations*) kepada perusahaan dan/atau lembaga bisnis. Hal ini merupakan pengembangan dari ide sebelumnya dimana hanya entitas Negara-lah yang diberikan kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban itu antara lain kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban menghormati (*obligation to respect*).

Perdebatan di atas dipicu oleh situasi ekspansi entitas bisnis yang luar biasa di seluruh dunia. Tatanan dunia, khususnya pada tahun 1990an, banyak diperankan bukan saja oleh Negara, tetapi juga oleh entitas bisnis. Tarik-menarik pengaruh antara Negara dan entitas bisnis menjadi peristiwa rutin. Pengaruh kontrak bisnis internasional terhadap kebijakan Negara juga menjadi tema diskusi di banyak forum akademik. Hal yang tidak kalah penting adalah diskusi mengenai potensi dan/atau kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dan/atau merupakan imbas produksi entitas bisnis. Beberapa kasus dapat dirujuk untuk memperlihatkan situasi ini seperti Kasus Bopal di India, pelibatan militer untuk pengamanan produksi perusahaan gas seperti di Aceh, Indonesia dan Myanmar, kasus Blood Diamond di Afrika Selatan dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Khusus di Indonesia, beberapa kasus dapat dirujuk antara lain pencemaran Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya di Sulawesi; dugaan pelanggaran hak

asasi manusia terhadap suku Amungme dan Kamoro akibat eksplorasi PT. Freeport di Papua; konflik berdarah di pelabuhan Sape, Lombok Barat dan Mesuji, Lampung; dan Lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kasus-kasus yang terjadi di pelbagai belahan dunia tersebut kemudian menginspirasi banyak pihak untuk memikirkan sebuah peraturan mengenai bisnis dan hak asasi manusia. Pada level internasional, perdebatan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menunjuk Prof. John G. Ruggie sebagai Perwakilan Khusus PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. John Ruggie kemudian mengadakan serangkaian penelitian panjang tentang hak asasi manusia dan perusahaan transnational serta perusahaan bisnis lainnya. Penelitian panjang yang dilaksanakan sejak 2005-2011 tersebut kemudian diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama *"Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework"*.

Berkaitan dengan perkembangan di atas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia melakukan penelitian menguji sejauhmana kepatuhan hukum bisnis di Indonesia, khususnya di bidang pertambangan dan perkebunan, dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

B. Kegiatan

Proses penelitian ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan antara lain workshop pra penelitian, penelitian, workshop pasca penelitian, dan penerbitan buku. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:

1. Workshop Pra Penelitian
Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 11-12 April 2013 dengan



This activity was held in Yogyakarta on 11-12 April 2013 and attended by 20 participants consisting of academics, NGO activists, business players and government representatives. The workshop preceded with a presentation of "Relationship between Human Rights and Business" by Prof. David Kinley (University of Sydney) followed with a presentation by Prof. Hikmahanto Juwana (University of Indonesia) who presented "The Relationship between International Human Rights Law with International Business Law" and Prof. Nindyo Pramono

B. Description

John Ruggie as special rapporteur on business and human rights. John Ruggie then engaged a long research from 2005-2011 on human rights issue and transnational corporations and other business enterprises. The result of the research then adopted by Human Rights Council of United Nations with "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework". In this regard, the Centre for Human Rights Studies, Islamic University of Indonesia conducted a study to test the extent of compliance of business law in Indonesia, particularly in the mining and plantations, with the principles of human rights.

as follows:

1. Pre-research Workshop

Research "Analysis of Compliance of Regulations on the Mining and Plantation Business Against Principles of Human Rights" conducted by four researchers, namely Dr. Siti Anisah, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Mahrus Ali, S.H., M.H., and Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., for eight months. General conclusion of this research was many regulations incompatible with the principles of human rights. Several incompatibilities are related to the issue of land, labor, environment and security. Many regulations collide with the principles of human rights such as labor, land especially indigenous lands, environmental damage caused by business practices and weak state regulations on post-mining environmental restoration, and security aspects for business, labor and business practices affected communities.

2. Research

research. After the panel session was over, the workshop continued with the presentation of a research proposal prepared by the research team and followed by a discussion with all participants. The results of this workshop were the formulation of recommendations for improvement of the research proposal and information that will be collected and analyzed at the time of the



(Gadjah Mada University) Indonesian Business Law and Policy".

diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari akademisi, aktifis lembaga swadaya masyarakat, pelaku bisnis dan perwakilan pemerintah. Workshop diawali dengan presentasi konsep **"Relasi**



antara Hak Asasi Manusia dan Bisnis" Oleh: Prof. David Kinley (University of Sidney) dilanjutkan dengan pemaparan konteks ke-Indonesia-an oleh Prof. Hikmahanto Juwana (Universitas Indonesia) dengan materi **"Relasi antara Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dengan Hukum Bisnis Internasional"** dan Prof. Nindyo Pramono (Universitas Gadjah Mada) dengan materi **"Hukum dan Kebijakan Bisnis Indonesia"**.

Selesai panel oleh dua narasumber, workshop dilanjutkan dengan presentasi proposal penelitian yang telah disiapkan oleh Tim Peneliti dan diikuti dengan diskusi dengan seluruh peserta. Hasil workshop ini adalah rumusan rekomendasi perbaikan proposal penelitian dan informasi data-data yang akan dikumpulkan dan dianalisis pada saat penelitian.

2. Penelitian

Kegiatan kedua adalah penelitian. Penelitian ini berjudul **"Analisis Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan dan Perkebunan Terhadap Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia"** dilakukan oleh 4 (empat) orang antara lain Dr. Siti Anisah, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Mahrus Ali, S.H., M.H., dan Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.. Penelitian ini telah dilakukan selama 8 bulan. Secara umum kesimpulan penelitiannya adalah masih banyak ditemukan peraturan perundang-

undangan yang tidak sesuai (*incompatible*) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa isu ketidaksesuaiannya antara lain bersinggungan dengan persoalan pertanahan, perburuhan, lingkungan dan keamanan. Ditemukan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertabrakan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada aspek relasi perburuhan, aspek tanah khususnya berkaitan dengan tanah ulayat atau tanah masyarakat adat, aspek kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktek bisnis dan lemahnya aturan negara tentang perbaikan lingkungan pasca tambang, dan aspek keamanan bagi pelaku bisnis, buruh dan masyarakat terdampak praktek usaha.

3. Workshop Pasca Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta pada 25-26 November 2013 dan diikuti oleh 20 orang peserta yang sama dengan workshop pra



penelitian. Workshop dilakukan untuk memaparkan hasil penelitian kepada para pakar untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi perbaikan.

Secara umum, laporan penelitian dianggap telah memadai namun perlu dilakukan perbaikan khususnya pada sistematika analisis dan penajaman pada bagian-bagian tertentu.

4. Penerbitan Hasil Penelitian

Penerbitan buku yang direncanakan dilaksanakan juga pada tahun 2013 namun belum terlaksana karena perbaikan laporan penelitian belum selesai dilakukan. Penerbitan buku direncanakan dilaksanakan pada tahun 2014.

This publication is planned to be done in 2013 but due to the improvement research reports have not been completed, the publication is planned to be conducted in 2014.

4. Publication of Research Results

In general, the report was considered adequate but needs to be improved, especially on the systematic analysis and refinement in certain parts.

workshop presents the results of research before the experts to obtain feedbacks and recommendations for improvement.



This workshop held in Yogyakarta on 25-26 November 2013, and was attended by 20 research workshop. This

3. Post-research Workshop

Lecturers Capacity Building in Promoting, Fulfilling and Protecting Human Rights: Civil and Political Rights



A. Background

The issue of human rights gained momentum after the 1998 reformation. The number of human rights violations incidents that occurred during the New Order regime much less effected people's understanding on the rights

they have. At the same time, there is a debate about human rights itself regarding its substance, the actors, and its relation to the Indonesian culture.

The emergence of human rights issues as well as the debate on it requires a forum as medium to discuss it extensively. At the same time, it is also needed intellectual actors who can provide learning on human rights properly, on the aspects of the definition, substance, history and context.

Lecturers, as an intellectual representation and as a teacher, are very important to be introduced and continuously strengthened their understanding on human rights. In such framework, therefore, Pusham UII and NCHR held human rights advanced training for lecturers.

Capacity Building Dosen Pengajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dalam rangka Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hak Sipil dan Politik

A. Latarbelakang



Isu hak asasi manusia membesar setelah reformasi 1998. Begitu banyaknya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ketika rezim Orde Baru yang sedikit banyak berpengaruh pada pemahaman masyarakat

terhadap hak-hak yang melekat pada diri mereka. Namun pada saat bersamaan, muncul perdebatan tentang hak asasi manusia itu sendiri yang terkait dengan substansi hak, aktor, dan kaitannya dengan kultur masyarakat Indonesia.

Merebaknya isu hak asasi manusia dan perdebatannya pada sisi yang lain membutuhkan adanya forum yang dapat menjadi media untuk mendiskusikannya lebih mendalam. Pada saat bersamaan pula dibutuhkan aktor-aktor intelektual yang dapat memberikan pemahaman tentang hak asasi manusia dengan benar, baik itu pada aspek definisi, substansi, sejarah maupun kontekstualisasinya.

Keberadaan dosen sebagai representasi intelektual dan tugasnya sebagai pengajar penting untuk diperkuat dan diperkenalkan terus menerus terkait diskursus hak asasi manusia. Dalam kerangka itu, Pusham UII dan NCHR pada tahun 2013 melakukan pelatihan HAM tingkat lanjut (*advance*).

B. Deskripsi

Pelatihan tingkat lanjut tahun 2013 ini mengangkat tema yang berkaitan dengan hak sipil dan politik. Pelatihan ini menghadirkan pembicara yang



berpengalaman dan memiliki pengetahuan mendalam tentang hak asasi manusia. Selain pembicara, pelatihan ini dipandu oleh fasilitator dan dalam beberapa sesi peserta diajak menonton film yang berkaitan dengan potret hak asasi manusia.

Pada tahun 2013, pelatihan ini diselenggarakan dua kali. Pelatihan pertama diselenggarakan di Yogyakarta bertempat di hotel Jogjakarta Plaza pada tanggal 6-8 Mei 2013, diikuti sekitar 40 dosen hukum dan HAM di berbagai daerah yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan hak asasi manusia tingkat dasar. Beberapa materi yang didiskusikan selama pelatihan ialah terkait hak hidup, hak untuk berkeluarga dan privasi, hak kebebasan berpendapat, berekspresi dan mendapatkan informasi serta kebebasan untuk berserikat, hak untuk bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan administrasi peradilan.

Sedangkan pelatihan kedua dilangsungkan di Semarang, bertempat di hotel Novotel Semarang pada 21-23 Mei 2013. Pelatihan ini sama dengan pelatihan sebelumnya diikuti sebanyak 40 dosen hukum HAM dari berbagai daerah. Pelatihan yang dilangsungkan 3 hari ini mendiskusikan beberapa materi, yaitu terkait agama dan hubungannya dengan demokrasi dan hak asasi manusia, hak untuk hidup, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, hak kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, studi kasus hukuman mati, dan beberapa lainnya. Pelatihan ini cukup menarik karena peserta diajak untuk melakukan studi kasus dengan pendekatan hak asasi manusia.

The theme of this training is civil rights and political rights. This training invites experienced speakers who have thorough knowledge of human rights. In addition to speakers, the training was also guided by facilitators and in several sessions the participants were invited to watch human rights related movie. In 2013, the training was held twice. The first training was held at Jogjakarta Plaza Hotel on 6-8 May 2013 and was attended by about 40 lecturers of law and human rights from various regions who previously had been attended human rights training at a basic level. The training materials are the right to life, the right to family and privacy, the right to freedom of opinion, expression and information and freedom of association, the right to freedom from slavery and servitude, the right to participate in public affairs and justice. The second training was held at the Novotel Semarang on 21 to 23 May 2013, and was also attended by forty human rights law lecturers from different areas. The training was held for three days to discuss several issues, namely religion and its relationship to democracy and human rights, the right to life, freedom from slavery and servitude, the right to freedom of thought, conscience and religion, the right to participate in public affairs and several others. The training is quite interesting because the participants were asked to analyze death penalty case using human rights approach.



B. Deskripsi

This activity is conducted because of the need for providing knowledge bases for the Police Academy graduates to understand the security conflicts issues, especially related to religious violence. This event has invited participants and resource persons who have competence in discussing the theme of police and challenges in conflict-based religious issues. The result of the discussion in this workshop will then be the basis of consideration in order to make the teaching syllabus on 'handling of the issue of religion-based conflict'. This activity is conducted in Yogyakarta with 24 participants and four speakers from campus, researchers and also from the Academy. This workshop resulted in several important inputs and notes to be used as a recommendation of making a book /

2. Seminar and Workshop Strengthening the Police Academy Education and the

Challenge of Conflict-Based Religious Issues

This activity was conducted since it is important for police to be able to address the security issues related to religious freedom, given the number of cases and incidents of violence in the name of religion. This event was inviting speakers who are competent in religious freedom issues ranging from observers, academics to the police. After presentations, the event continued with intensive discussions among participants. This activity is conducted in Yogyakarta by inviting 24 participants from working group members, the community and the police. This workshop obtained some important notes either at the level of concept understanding, comprehension and several security strategies.

1. Seminar and Workshop Religious Freedom, Police and Security Challenges

The explanation of this program can be specified per activity as follows:

Women's Rights and Religious Tolerance in Indonesia

Program Hak Wanita dan Toleransi Beragama di Indonesia

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Seminar dan Workshop Religious Freedom, Kepolisian dan Tantangan Keamanan

Kegiatan ini dilaksanakan karena penting bagi institusi kepolisian untuk bisa merumuskan dan mengatasi berbagai persoalan keamanan yang terkait dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan mengingat masih banyaknya kasus dan peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama. Acara ini menghadirkan beberapa narasumber penting yang kompeten dalam *religious freedom* dan juga disertai diskusi intensif diantara peserta workshop. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Santika Yogyakarta dengan mengundang sekitar 24 peserta dari pokja, masyarakat dan kepolisian dengan mengundang 3 pembicara dari pengamat, akademisi dan juga kepolisian. Workshop ini menghasilkan beberapa catatan penting baik dalam tataran konsep pengertian, pemahaman serta beberapa strategi penanganan keamanan.

2. Seminar dan Workshop Membangun Pendidikan Akpol dan Tantangan Konflik yang Berbasis Isu Agama

Kegiatan ini dilaksanakan karena adanya kebutuhan memberikan basis pengetahuan bagi para lulusan Akpol untuk memahami berbagai persoalan tantangan konflik keamanan dan terutama kekerasan yang bernuansa keagamaan. Acara ini mengundang beberapa peserta dan narasumber yang berkompeten untuk membicarakan tema kepolisian dan tantangan konflik berbasis isu agama. Hasil diskusi workshop kemudian akan menjadi pertimbangan dasar dalam rangka membuat silabus pengajaran tentang 'penanganan konflik yang berbasis isu agama'. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Santika Yogyakarta dengan mengundang sekitar 24 peserta undangan dan 4 (empat) narasumber dari kampus, peneliti dan juga institusi Akpol. Workshop ini menghasilkan beberapa

rumusan pandangan dan catatan penting untuk dijadikan rekomendasi pembuatan buku (modul) pengajaran kepolisian terkait isu konflik dan kekerasan berbasis isu agama.

3. Workshop dan Diskusi Perumusan dan Penulisan Modul *Religious Freedom*

Kegiatan ini dilaksanakan karena perlunya mendapatkan berbagai masukan penting untuk kebutuhan pembuatan modul *religious freedom*. Acara berbentuk diskusi dan perumusan rancangan pembuatan modul untuk pembelajaran Akpol. Beberapa dosen, peneliti dan penulis diundang untuk bersama-sama merumuskan poin-poin dan topik-topik penting dalam pembuatan modul. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Pusham UII Yogyakarta dengan mengundang peserta diskusi sekitar 13 orang. Diskusi ini berhasil mendapatkan rancangan awal pembuatan modul *religious freedom*.

4. Workshop Penyusunan Silabus Pengajaran “Polisi dan Kebebasan Beragama” di AKPOL



Workshop ini dilaksanakan untuk mempresentasikan hasil rancangan modul pada berbagai pihak sebagai cara untuk meminta masukan dan pendalaman terhadap kualitas modul. Banyak pihak yang diundang

terutama mereka yang banyak bergulat pada isu tersebut serta beberapa penulis. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Santika Yogyakarta dengan mengundang 31 peserta. Workshop ini memberikan revisi dan pendalaman modul dengan beberapa catatan tambahan mengenai bentuk, isi dan rancangan keseluruhan modul.

5. Pembelajaran Penanganan Konflik Berbasis isu Agama untuk Taruna di Akpol Semarang

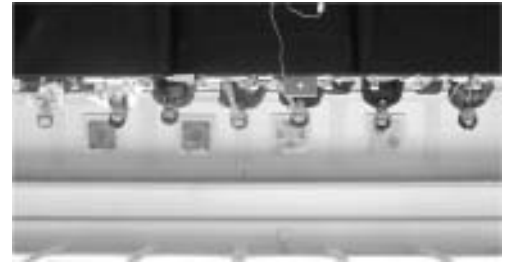
Kegiatan ini dilaksanakan karena adanya kebutuhan memberikan materi pembelajaran tentang penanganan konflik dan kekerasan yang bernuansa isu agama bagi calon lulusan Akpol. Acara berbentuk kuliah kelas di Akpol Semarang

This activity was implemented because of the need for providing learning material on conflict resolution and religious-based conflicts for prospective

Academy in Semarang

5. Education of Religious-Based Conflict Management for Cadets in the Police

module obtained some additional notes for the refinement of the form, the content and design of the overall module.



In this workshop, the final design modules presented to various parties to obtain additional input. 31 attended participants are those who are specifically concerned with the issue. From this workshop, the module obtained some additional notes for the refinement of the form, the content and design of the overall module.

Freedom” at Police Academy

4. Workshop on Development of Teaching Syllaby “Police and Religious

module. This discussion managed to get the initial design of the module.

This activity is implemented due the need to obtain various important inputs for the development of module of religious freedom. The event was held to discuss the design of the module. Thirteen lecturers, researchers and writers have been invited to jointly formulate important points and topics to be included in the module. This discussion managed to get the initial design of the module.

3. Workshop and Discussion on the Development of Module of Religious Freedom

module for teaching the police over the issue of conflict and violence based on religious issues.

The research was conducted because of the need to explore and examine the religious-based violent conflicts in some areas, particularly how the police responded. This research was conducted in eight different Provincial Police regions across Indonesia by eight researchers from Pusham UII. The eight Provincial Police regions are Central Java, Aceh, East Java, North Sumatra, North Sulawesi, Central Sulawesi, North Maluku and West Papua.

7. Research on the Police and the Challenges of Religious-Based Conflict in 8

This activity is conducted as deemed necessary to have module and handbook on handling religious-based violent conflict. This module is made by several authors from Pusham UII, police, lecturer and also representative of The Asia Foundation.

6. Religious Freedom Module Development

graduates of the Police Academy. Activities included lectures in the classroom for as many as 287 cadets. As for the lecturers, besides from the Police Academy, some lecturers from outside the Academy were also invited to give a lecture. This activity gives understanding to the cadets about handling religious-based conflict and violence, including its application in the field assignment.



untuk satu angkatan taruna/taruni berjumlah sekitar 287 taruna. Para pengajar diambil dari luar dan dari dalam Akpol. Kegiatan ini berhasil membuat para taruna memahami berbagai persoalan tentang cara penanganan konflik dan kekerasan yang bernuansa agama. Pemahaman ini juga sampai pada persoalan aplikasi di lapangan.



6. Penulisan Buku/Modul Religious Freedom

Kegiatan ini dilaksanakan karena dirasa perlu adanya sebuah modul dan buku pegangan pembelajaran tentang materi penanganan konflik kekerasan yang bernuansa agama. Kegiatan ini berbentuk penulisan dan pencetakan modul/buku yang dibuat oleh beberapa penulis yang berasal dari dari Pusham UII, Kepolisian, Dosen dan juga perwakilan dari The Asia Foundation.

7. Riset Kepolisian dan Tantangan Konflik Berbasis Isu Agama di 8 Polda Indonesia

Riset ini dilaksanakan karena adanya kebutuhan untuk menggali dan meneliti berbagai persoalan konflik kekerasan yang bernuansa agama di beberapa daerah terutama bagaimana kepolisian daerah meresponnya. Riset ini dilakukan di 8 (delapan) wilayah Polda yang tersebar di seluruh Indonesia oleh 8 peneliti dari Pusham UII. Delapan wilayah Polda tersebut adalah Polda Jawa Tengah, Polda Aceh, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Tengah, Polda Maluku Utara, dan Polda Papua Barat.

Riset Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja tentang Kesehatan Reproduksi

A. Latarbelakang



Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) melakukan kegiatan survei kesehatan reproduksi secara nasional. Survei tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan,

sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melakukan *mapping* serta memahami perubahan persepsi dan pengetahuan remaja Indonesia mengenai kesehatan reproduksi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi basis pengambilan kebijakan mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja.

Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui beberapa hal, diantaranya: (1) pemahaman/ pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, (2) sikap remaja terkait kesehatan reproduksi, (3) perilaku remaja terkait kesehatan reproduksi, (4) pengalaman remaja dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, dan (5) kinerja penyelenggara layanan kesehatan dalam hal layanan kesehatan reproduksi.

B. Deskripsi Kegiatan

Riset diawali dengan workshop pra penelitian pada 10 April 2013 di Yogyakarta yang menyepakati beberapa hal terkait penelitian yaitu antara lain kebutuhan responden yang berjumlah 2000 remaja dengan kisaran usia 15 hingga 24 tahun dengan komposisi jenis kelamin 50% perempuan dan 50% laki-laki yang dipilih secara acak. Riset ini juga menyasar penyelenggara layanan kesehatan sebagai

The research started with a pre-research workshop on 10 April 2013 in Yogyakarta, which then agree on a few things, namely the need for as many as 2,000 adolescent respondents from 15 to 24 years old, with the sex composition of 50% women and 50% of men and were selected randomly. The research is also

B. Deskripsi

In more detail, the purpose of this research was to determine several things, including: (1) knowledge of adolescents about reproductive health, (2) the attitudes of adolescents to reproductive health, (3) the behavior of adolescents in relation to reproductive health, (4) experience adolescents have in accessing reproductive health services, and (5) the performance of health care providers in terms of reproductive health services.

reproductive health for adolescents. This research is also expected to be the basis of policy making regarding perceptions and knowledge of Indonesian adolescents about reproductive health. This research is important for mapping and understanding the changing adolescents about reproductive health.

Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia in collaboration with the Women's Health Foundation are conducting a national survey of reproductive health. The survey was conducted to collect data on knowledge, attitudes and behaviors of



A. Background

Research on Knowledge, Attitudes and Behaviors of Adolescents on Reproductive Health

The research began in April 2013 and conducted for 2-3 months with the targeting health providers as respondents. The research was conducted by Pusham UII. The areas of research are Balikpapan, Bandung, Jambi, Makassar, Medan, Palembang, Surabaya, and Yogyakarta. The research successfully discovered: (1) in some extent, knowledge of adolescents about reproductive health are fairly good, (2) most adolescents embraced the paradigm of normal-abnormal in assessing a person's gender identity, for example, the majority considers LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) as a sinner, (3) least part of adolescents' dating patterns have led to sexually active, (4) most adolescents consider reproductive health rights for them was only limited to reproductive health education, (5) many adolescents choose doctors when they want to access reproductive health services.

The research successfully discovered: (1) in some extent, knowledge of adolescents about reproductive health are fairly good, (2) most adolescents embraced the paradigm of normal-abnormal in assessing a person's gender identity, for example, the majority considers LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) as a sinner, (3) least part of adolescents' dating patterns have led to sexually active, (4) most adolescents consider reproductive health rights for them was only limited to reproductive health education, (5) many adolescents choose doctors when they want to access reproductive health services.



C. Results

The research was conducted by Pusham UII. The areas of research are Balikpapan, Bandung, Jambi, Makassar, Medan, Palembang, Surabaya, and Yogyakarta. The research successfully discovered: (1) in some extent, knowledge of adolescents about reproductive health are fairly good, (2) most adolescents embraced the paradigm of normal-abnormal in assessing a person's gender identity, for example, the majority considers LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) as a sinner, (3) least part of adolescents' dating patterns have led to sexually active, (4) most adolescents consider reproductive health rights for them was only limited to reproductive health education, (5) many adolescents choose doctors when they want to access reproductive health services.

responden.

Riset dimulai pada bulan April 2013 dan dilaksanakan selama 2-3 bulan dengan penambahan waktu sekitar satu bulan untuk penyusunan hasil survei. Riset ini dilakukan dengan menggunakan jaringan dosen pengajar hukum dan HAM diberbagai universitas baik negeri maupun swasta yang telah dimiliki Pusham UII sejak lama. Wilayah tempat dilaksanakannya riset ini adalah Balikpapan, Bandung, Jambi, Makassar, Medan, Palembang, Surabaya, dan Yogyakarta.

C. Hasil Kegiatan



Dari penelitian ini dapat diketahui beberapa hal, diantaranya; (1) dalam beberapa hal pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi cukup baik, (2) kebanyakan remaja menganut paradigma normal-abnormal dalam menilai identitas gender seseorang, sebagai contoh mayoritas menganggap kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) sebagai pendosa, (3) pola berpacaran remaja sebagian kecil sudah mengarah pada seksual aktif, (4) sebagian besar remaja menganggap hak atas kesehatan reproduksi bagi mereka hanya sebatas pendidikan kesehatan reproduksi, (5) dokter merupakan pihak yang banyak dipilih remaja saat akan mengakses layanan kesehatan reproduksi. Setidak-tidaknya 5 poin diatas menjadi temuan di daerah tempat dilaksanakannya survei, namun hal ini tidak untuk menggeneralisir kondisi remaja di Indonesia secara umum karena patut diingat bahwa proses *sampling* dari penelitian ini hanya dilakukan di kota-kota besar saja sedangkan untuk daerah lain, terutama pedesaan, tidak menjadi bagian dari penelitian ini.

Bagian Umum

Sebagaimana tugas dan fungsinya, Bagian Umum masih tetap melakukan pemeliharaan dan penambahan inventaris kantor yang dibutuhkan serta melakukan penambahan koleksi buku perpustakaan.

A. Buku

Pada tahun 2013, PUSHAM UII telah memiliki 2639 judul dengan penambahan sekitar 197 judul buku dari 2442 judul pada tahun sebelumnya.

Selain menerbitkan berbagai alat kampanye seperti buletin, majalah dan komik, pada tahun ini juga PUSHAM UII menambah terbitan tahun sebelumnya, yaitu:

1. *Modul Penanganan Konflik Bernuansa Agama*
Penulis: ST. Tri Guntur Narwaya dkk
2. *Perlindungan Polisi Terhadap Kaum Minoritas & Pelayanan Public Di Wilayah Polda DIY*
Penulis: Tim Peneliti PUSHAM UII & M. Syafi'ie
3. *Saatnya Polisi Berubah !*
Penulis: Eko Prasetyo & Tri Guntur Narwaya

B. Peralatan Kantor

Tahun 2013 ini, PUSHAM UII telah membeli beberapa peralatan penunjang aktifitas kantor sebagai tambahan inventaris kantor pada tahun sebelumnya.

Inventories

According to its duties and functions, General Affairs is still maintaining and adding office inventories and supplies as needed, and adding books for library collections.

A. Book

In 2013, PUSHAM UII has had 2639 titles of book with the addition of approximately 197 titles from 2442 titles in the previous year.

Besides publishing campaign tools such as bulletins, magazines and comics, PUSHAM UII also publish several books this year, namely:

1. *Module of Religious Conflicts Management*
By: ST. Tri Guntur Narwaya, et al
2. *Police Protection Toward Minority Groups and Public Service In Yogyakarta Regional Police*
By: PUSHAM UII Team & M. Syafi'ie
3. *Time For Police to Change !*
By: Eko Prasetyo & Tri Guntur Narwaya

B. Office Equipment

In 2013 PUSHAM UII has purchased some supporting office activities equipment as addition to prior year inventories.

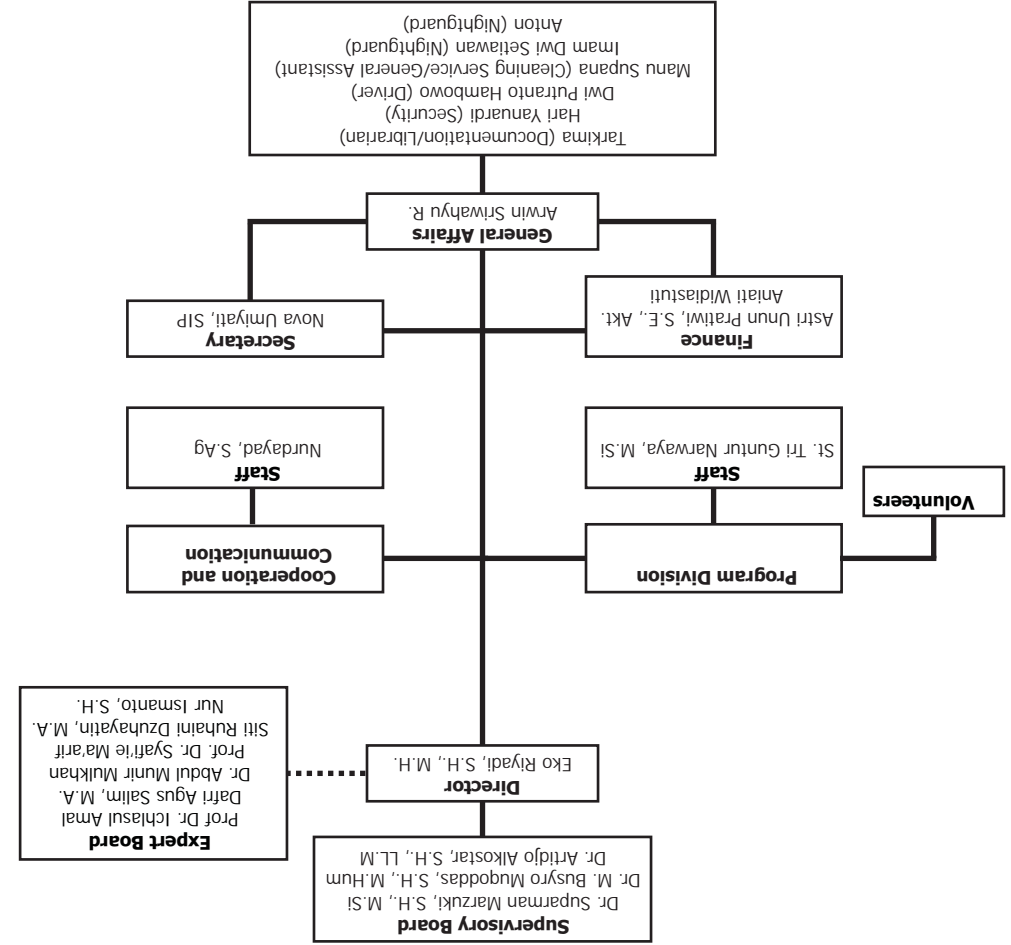
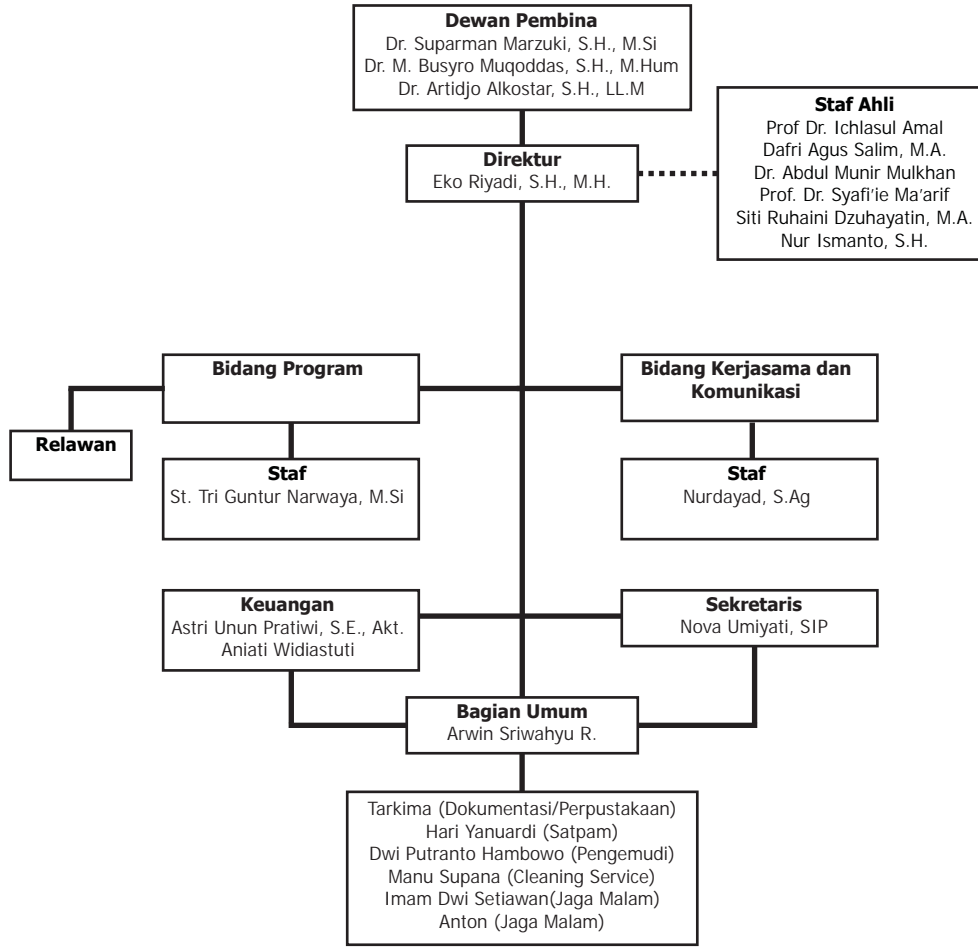
Realisasi Program Tahun 2013

| No. | Project Title | Period | Venue | Participants | Donor Agency |
|-----|--|---|---|---|---------------------------------|
| 1. | Strengthening Civic Values through Religious Institutions and the Police in Indonesia | 1 January-1 December 2013 | DIY and Central Java | Police Officials, Cadets, students, public | The Asia Foundation |
| 2. | Human Rights Training for Judges I and II: Promote Judiciary Institution in Eradicating Corruption for the Fulfillment of Human Rights | 17-20 June 2013 and 18-21 November 2013 | Yogyakarta | 60 judges from Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Sumatra, Java, DIY and DKI | NCHR University of Oslo, Norway |
| 3. | Legal Audit of Indonesian Business Law and Policy in Compliance with Human Rights Principles | 1 April 2013-31 March 2014 | Yogyakarta | Academicians | NCHR University of Oslo, Norway |
| 4. | Lecturers Capacity Building in Promoting, Fulfilling and Protecting Human Rights | 6-8 May 2013 and 21-23 May 2013 | Yogyakarta and Semarang | 73 Human Rights and Law Lecturers | NCHR University of Oslo, Norway |
| 5. | Women's Rights and Religious Tolerance in Indonesia | 1 January-1 December 2013 | DIY and Central Java | Police Officials and Academy | The Asia Foundation |
| 6. | Research on Knowledge, Attitudes and Behaviors of Adolescents on Reproductive Health | June-August 2013 | Jambi, Surabaya, Bandung, Palembang, Makassar, Medan, Balikpapan and Yogyakarta | School-age children and teenagers, health workers | Women's Health Foundation |

| No. | Kegiatan | Waktu | Tempat | Peserta | Sumber Dana |
|-----|--|---|---|--|---------------------------------|
| 1. | Memperkuat Nilai-Nilai Kewarganegaraan melalui Institusi Keagamaan dan Kepolisian di Indonesia | 1 Januari-1 Desember 2013 | DIY dan Sekitarnya | Kalangan Kepolisian, Taruna Akpol, Mahasiswa, Masyarakat | The Asia Foundation |
| 2. | Training HAM untuk Hakim I dan II: Mendorong Lembaga Peradilan dalam Memberantas Korupsi Demi Terpenuhinya Hak Asasi Manusia | 17-20 Juni 2013 dan 18-21 November 2013 | Bali dan Yogyakarta | 60 hakim dari Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Sumatra, Jawa, DIY dan DKI | NCHR Universitas Oslo, Norwegia |
| 3. | Audit Legal terhadap Hukum Bisnis dan Kebijakan Bisnis di Indonesia dalam Kesesuaiannya dengan Prinsip Hak Asasi Manusia | 1 April 2013-31 Maret 2014 | Yogyakarta | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia | NCHR Universitas Oslo, Norwegia |
| 4. | Pelatihan HAM Lanjut bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM | 6-8 Mei 2013 dan 21-23 Mei 2013 | Yogyakarta dan Semarang | 73 Dosen Pengajar Hukum dan HAM dari berbagai Universitas Swasta dan Negeri di Indonesia | NCHR Universitas Oslo, Norwegia |
| 5. | Program Hak Wanita dan Toleransi Beragama di Indonesia | 1 Januari-1 Desember 2013 | DIY dan Sekitarnya | Kalangan kepolisian di lingkungan Akademi Kepolisian dan Lembaga Pendidikan POLRI | The Asia Foundation |
| 6. | Riset Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja tentang Kesehatan Reproduksi | Juni-Agustus 2013 | Jambi, Surabaya, Bandung, Palembang, Makassar, Medan, Balikpapan dan Yogyakarta | Anak di Usia Sekolah/Remaja, Petugas Kesehatan | Yayasan Kesehatan Perempuan |

Programs of Year 2013

Struktur Organisasi



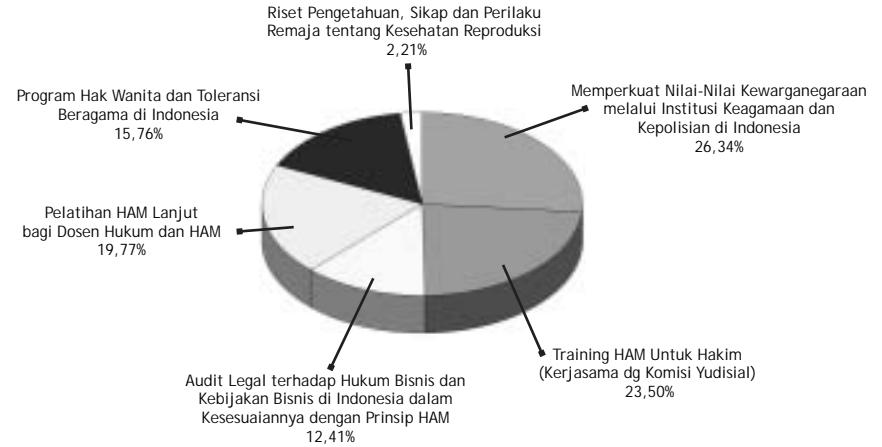
Organization Chart

Laporan Keuangan

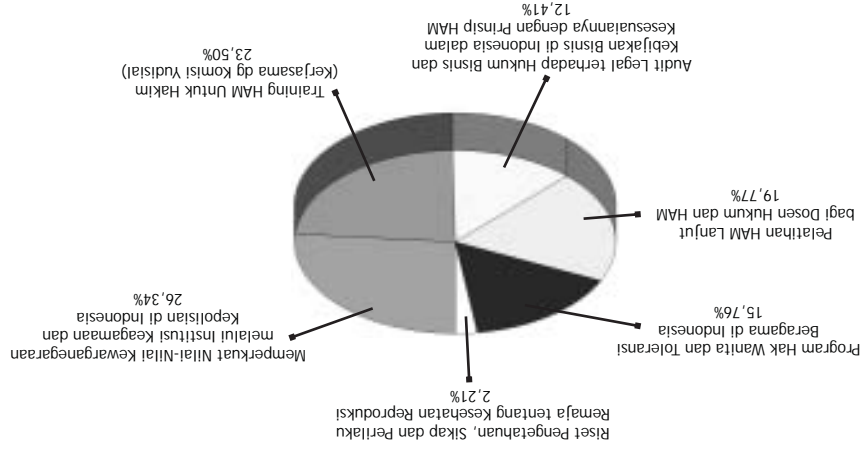
Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Tahun 2013

| No. | Nama Proyek/Program | Lembaga Donor | Jumlah Dana Dikelola (Rp) | % ase | Jangka Waktu |
|--------------|--|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. | Memperkuat Nilai-Nilai Kewarganegaraan melalui Institusi Keagamaan dan Kepolisian di Indonesia | TAF | 1.146.755.500 | 26,34% | Januari - Desember 2013 |
| 2. | Training HAM Untuk Hakim (Kerjasama dg Komisi Yudisial) | NCHR | 1.022.957.900 | 23,50% | 17-20 Juni 2013, 18-21 November 2013 |
| | Audit Legal terhadap Hukum Bisnis dan Kebijakan Bisnis di Indonesia dalam Kesesuaiannya dengan Prinsip HAM | | 540.303.500 | 12,41% | April - Oktober 2013 |
| | Pelatihan HAM Lanjut bagi Dosen Hukum dan HAM | | 860.403.650 | 19,77% | 6-8 Mei 2013, 21-23 Mei 2013 |
| 3. | Program Hak Wanita dan Toleransi Beragama di Indonesia | TAF | 686.030.500 | 15,76% | Januari - September 2013 |
| 4. | Riset Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja tentang Kesehatan Reproduksi | YKP | 96.390.000 | 2,21% | April - September 2013 |
| TOTAL | | | 4.352.841.050 | 100,00% | |

Prosentase Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Tahun 2013



Project Fund Managed Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia Year 2013



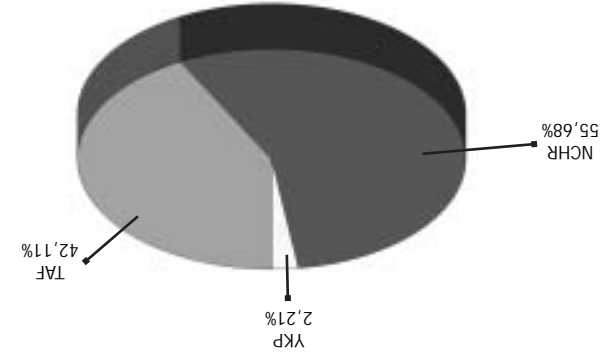
Financial Statement Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia Year 2013

Financial Statement

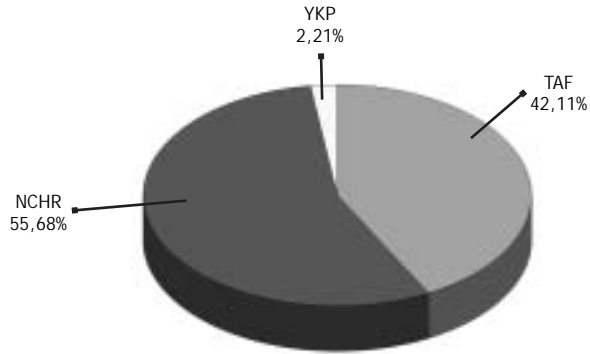
| No. | Project Title | Donor Agency | Amount (Rp) | % age | Duration |
|--------------|--|--------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. | Strengthening Civic Values through Religious Institutions and the Police in Indonesia | TAF | 1.146.755.500 | 26,34% | January - December 2013 |
| 2. | Human Rights Training for Judges I and II: Promote Judiciary Institution in Eradicating Corruption for the Fulfillment of Human Rights | NCHR | 1.022.957.900 | 23,50% | 17-20 June 2013, 18-21 November 2013 |
| | Legal Audit of Indonesian Business Law and Policy in Compliance with Human Rights Principles | | 540.303.500 | 12,41% | April - October 2013 |
| | Lecturers Capacity Building in Promoting, Fulfilling and Protecting Human Rights | | 860.403.650 | 19,77% | 6-8 May 2013, 21-23 May 2013 |
| 3. | Women's Rights and Religious Tolerance in Indonesia | TAF | 686.030.500 | 15,76% | January - September 2013 |
| 4. | Research on Knowledge, Attitudes and Behaviors of Adolescents on Reproductive Health | YKP | 96.390.000 | 2,21% | April - September 2013 |
| TOTAL | | | 4.352.841.050 | 100,00% | |

**Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Tahun 2013**

| No. | Nama Proyek/Program | Lembaga Donor | Jumlah Dana Dikelola (Rp) | Sub Total | % ase |
|--------------|--|---------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Memperkuat Nilai-Nilai Kewarganegaraan melalui Institusi Keagamaan dan Kepolisian di Indonesia | TAF | 1.146.755.500 | 1.832.786.000 | 42,11% |
| | Program Hak Wanita dan Toleransi Beragama di Indonesia | | 686.030.500 | | |
| 2. | Training HAM Untuk Hakim (Kerjasama dg Komisi Yudisial) | NCHR | 1.022.957.900 | 2.423.665.050 | 55,68% |
| | Audit Legal terhadap Hukum Bisnis dan Kebijakan Bisnis di Indonesia dalam Kesesuaiannya dengan Prinsip HAM | | 540.303.500 | | |
| | Pelatihan HAM Lanjut bagi Dosen Hukum dan HAM | | 860.403.650 | | |
| 3. | Riset Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja tentang Kesehatan Reproduksi | YKP | 96.390.000 | 96.390.000 | 2,21% |
| Total | | | 4.352.841.050 | 4.352.841.050 | 100,00% |



**Prosentase Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Tahun 2013**



**Project Fund Managed
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia
Year 2013**

| No. | Project Title | Donor Agency | Amount (Rp) | Sub Total | % ase |
|--------------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Strengthening Civic Values through Religious Institutions and the Police in Indonesia Women's Rights and Religious Tolerance in Indonesia | TAF | 1.146.755.500 | 1.832.786.000 | 42,11% |
| | | | 686.030.500 | | |
| 2. | Promote Judiciary Institution in Eradicating Corruption for the Fulfillment of Human Rights Legal Audit of Indonesian Business Law and Policy in Compliance with Human Rights Principles Lecturers Capacity Building in Promoting, Fulfilling and Protecting Human Rights | NCHR | 1.022.957.900 | 2.423.665.050 | 55,68% |
| | | | 540.303.500 | | |
| | | | 860.403.650 | | |
| | | | 860.403.650 | | |
| 3. | Research on Knowledge, Attitudes and Behaviors of Adolescents on Reproductive Health | YKP | 96.390.000 | 96.390.000 | 2,21% |
| Total | | | 4.352.841.050 | 4.352.841.050 | 100,00% |

**Financial Statement
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia
Year 2013**